



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2017



Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah  
BAPPELITBANGDA – KABUPATEN PURBALINGGA  
Tahun 2018

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap tindakan dan kebijakan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan konsep tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip antara lain : keterbukaan / transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, responsivitas, menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, serta membuka partisipasi masyarakat. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan agar setiap organisasi publik termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) dapat menjaga keselarasan antara tradisi, proses pengambilan keputusan, kemampuan pegawai serta kebutuhan seluruh stakeholder utamanya masyarakat luas sehingga mampu menjadi organisasi yang berkinerja tinggi.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, bersih dan bebas dari KKN. Untuk itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 1914 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengamanatkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAPPELITBANGDA juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan perencanaan dan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Penerapan sistem akuntabilitas yang dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### B. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- d. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017 adalah :

- a. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis BAPPELITBANGDA sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra BAPPELITBANGDA;
- b. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang;
- c. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.

### **D. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan peraturan daerah tersebut Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah merupakan perangkat daerah tipe A, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta Penelitian dan Pengembangan.

Peraturan Daerah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga, BAPPELITBANGDA mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Susunan Organisasi BAPPELITBANGDA, terdiri dari :

#### **1. Kepala Bappelitbangda**

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala BAPPELITBANGDA mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan;
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan BAPPELITBANGDA serta pemberian dukungan administratif bidang Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BAPPELITBANGDA. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat BAPPELITBANGDA mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan BAPPELITBANGDA;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan BAPPELITBANGDA;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan BAPPELITBANGDA;
- d. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan BAPPELITBANGDA;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BAPPELITBANGDA sesuai dengan fungsinya.

### 2.1 Kepala Subbagian Perencanaan.

Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengendalian program dan kegiatan, pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan BAPPELITBANGDA

### 2.2 Subbagian Keuangan.

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang keuangan meliputi perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi serta realisasi pelaksanaan anggaran di lingkungan BAPPELITBANGDA.

### 2.3 Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang

umum meliputi pembinaan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan BAPPELITBANGDA.

### 3. Kepala Bidang Ekonomi

Kepala Bidang Ekonomi mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Ekonomi meliputi produksi, pengembangan dunia usaha, penanaman modal dan ekonomi makro. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Ekonomi, menyelenggarakan fungsi :

- a. sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang produksi meliputi urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
- b. sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang pengembangan dunia usaha meliputi urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, pariwisata, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. sinkronisasi dan perencanaan pembangunan meliputi urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan ekonomi makro;
- d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BAPPELITBANGDA.

#### 3.1 Subbidang Produksi.

Kepala Subbidang Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang produksi meliputi bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan.

#### 3.2 Subbidang Pengembangan Dunia Usaha.

Kepala Subbidang Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Pengembangan Dunia Usaha meliputi bidang perindustrian, perdagangan, tenaga pariwisata, koperasi, usaha kecil dan menengah.

#### 3.3 Subbidang Penanaman Modal Dan Ekonomi Makro.

Kepala Subbidang Penanaman Modal dan Ekonomi Makro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Penanaman Modal Dan Ekonomi Makro meliputi bidang penanaman modal dan ekonomi makro.

### 4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial

Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial meliputi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi Pemerintahan Umum, urusan pemerintahan bidang Ketenteraman

- dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia meliputi urusan pemerintahan bidang Pendidikan, Perpustakaan, Kebudayaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepemudaan dan Olahraga;
- c. sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial meliputi urusan pemerintahan bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sosial dan Transmigrasi;
- d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BAPPELITBANGDA.

#### 4.1 Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Kepala Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi bidang Pemerintahan Umum, urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

#### 4.2 Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Kepala Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia meliputi bidang Pendidikan, Perpustakaan, Kebudayaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepemudaan dan Olahraga

#### 4.3 Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat.

Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat meliputi bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sosial dan Transmigrasi.

### 5. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah meliputi Penataan Ruang, Permukiman dan Pertanahan, Pekerjaan Umum dan Perhubungan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi :

- a. sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Penataan Ruang, Permukiman dan Pertanahan meliputi sub urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang, urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan;
- b. sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan meliputi urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, perhubungan, persandian, komunikasi dan informasi;
- c. sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup meliputi urusan pemerintahan bidang Energi Sumber Daya Mineral, Kehutanan dan Lingkungan Hidup;

d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### 5.1 Subbidang Penataan Ruang, Permukiman dan Pertanahan.

Kepala Subbidang Penataan Ruang, Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Penataan Ruang, Permukiman dan Pertanahan meliputi bidang sub urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang, Permukiman dan Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan.

#### 5.2 Subbidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan.

Kepala Subbidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan meliputi bidang Pekerjaan Umum, perhubungan, persandian, komunikasi dan informasi.

#### 5.3 Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Kepala Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup meliputi bidang Energi Sumber Daya Mineral, Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

### 6. Bidang Program Pembangunan dan Penelitian Pengembangan

Kepala Bidang Program Pembangunan dan Penelitian Pengembangan mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Program Pembangunan dan Penelitian Pengembangan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Program Pembangunan dan Penelitian Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang);
- b. perumusan dokumen Perencanaan dan Kebijakan Umum Pembangunan RPJPD, RPJMD, RKPD;
- c. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- d. penyusunan data usulan program prioritas pembangunan kepada K/L dan Provinsi dalam rangka sinergitas dan harmonisasi Kegiatan K/L dan Provinsi di Kabupaten;
- e. pengendalian dan evaluasi dokumen Perencanaan Pembangunan ;
- f. penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- g. pengoordinasian pelaksanaan, fasilitasi dan pembinaan kegiatan kelitbang;
- h. pengoordinasian pelaksanaan, fasilitasi dan pembinaan pengembangan Inovasi Daerah;
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BAPPELITBANGDA.

#### 6.1 Subbidang Penyusunan Program Pembangunan.

Kepala Subbidang Penyusunan Program Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), penyusunan dokumen Perencanaan dan Kebijakan Umum Pembangunan RPJPD, RPJMD, RKPD, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan K/L dan Provinsi di Kabupaten.

### 6.2 Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Program.

Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengendalian dan evaluasi dokumen Perencanaan Pembangunan, penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

### 6.3 Subbidang Penelitian dan Pengembangan.

Subbidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan, fasilitasi dan pembinaan kegiatan kelitbang dan pengembangan Inovasi Daerah.

## E. Susunan Kepegawaian dan Sarpras

Dalam menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangannya, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga memiliki sumberdaya aparatur pada tahun 2017 sebanyak 38 orang, sebagian besar atau paling banyak ada di Sekretariat yaitu 12 orang sedangkan jumlah PNS sesuai bidang tugasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

- a. Kepala : 1 orang
- b. Sekretariat : 12 orang
- c. Bidang Ekonomi : 6 orang
- d. Bidang Pemerintahan dan Kesra : 6 orang
- e. Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah : 7 orang
- f. Bidang Statistik, Pengendalian dan Evaluasi : 6 orang

Jumlah pegawai sesuai bidang tugasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.1**

**Komposisi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga  
Berdasarkan Golongan**

NO	BIDANG	GOLONGAN (Orang)				PTT	Total (Orang)
		I	II	III	IV		
1	Kepala				1		1
2	Sekretariat	-	3	8	1	7	19
3	PemKessos	-	-	5	1	1	7
4	Ekonomi	-	-	5	1	2	8
5	IPW	-	-	7	-	3	10
6	PPL	-	-	4	2	2	8
7	Fungsional Tertentu	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah (Orang)</b>		-	3	29	6	15	53

Dari sisi latar belakang pendidikan, sumber daya aparatur BAPPELITBANGDA yang berjumlah 38 orang tersebut cukup beragam. Sebagian besar yaitu sebanyak 21 orang berpendidikan sarjana, berpendidikan pasca sarjana sebanyak 12 orang, berpendidikan SLTA sebanyak 3 orang, dan berpendidikan SLTP sebanyak 1 orang.

Jumlah pegawai BAPPELITBANGDA berdasarkan latar belakang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.2**

**Jumlah PNS BAPPELITBANGDA Berdasarkan Latarbelakang Pendidikan**

NO	BIDANG	PENDIDIKAN (Orang)							TOTAL (Orang)
		SD	SLTP	SLTA	SAR MUD	S-1	S-2	S-3	
1	Kepala	-	-	-	-	1	-	-	1
2	Sekretariat	1	1	3	-	5	3	-	13
3	PemKessos	-	-	-	-	5	1	-	6
4	Ekonomi	-	-	-	-	3	3	-	6
5	IPW	-	-	-	-	6	1	-	7
6	PPL	-	-	-	-	2	4	-	6
7	Fungsional Tertentu	-	-	-	-	-	-	-	-

Adapun dari sisi sara prasarana, peralatan yang berkondisi baik sebesar 651 buah dan kondisi rusak sejumlah 490 peralatan. Selengkapnya kondisi prasarana kerja yang ada sebagai berikut

**Tabel 3**

**Jumlah Prasaran Kantor BAPPELITBANGDA Tahun 2017**

SARANA	JUMLAH	
Generating Set	1	Unit
Mobil	8	Unit
Sepeda Motor	36	Unit
Mesin Ketik Manual standart	3	Unit
Mesin Absensi (Time Recorder)	1	Unit
Rak Besi /Metal	16	Unit
Filling Besi/Metal	64	Unit

<b>SARANA</b>	<b>JUMLAH</b>	
Band Kas	1	Unit
Kardek Kayu	1	Unit
Lemari Kaca	2	Unit
Rak Arsip	8	Unit
Lemari Instrumen	1	Unit
Karpet	3	Unit
Alat Penghancur Kertas	1	Unit
Papan Nama Instansi	2	Unit
White Board	2	Unit
Layar OHP	2	Unit
Lemari Kayu	7	Unit
Rak Kayu	6	Unit
Meja Besi /Metal	2	Unit
Kursi Besi /Metal	8	Unit
Meja Rapat	21	Unit
Meja Makan	2	Unit
Meja Resepsion	1	Unit
Kursi Rapat	47	Unit
Kursi Tamu	6	Unit
Kursi Lipat	1	Unit
Meja Komputer	15	Unit
Sofa	1	Unit
Mesin Penghisap Debu	1	Unit
Lemari Es	1	Unit
AC Split	24	Unit
Televisi	5	Unit
Sound System	6	Unit
Wireless	2	Unit

<b>SARANA</b>	<b>JUMLAH</b>	
Unit Power supply	1	Unit
Camera Video	1	Unit
Handy Cam	3	Unit
Korden	1	Unit
Alat Pemadam / Portable	4	Unit
Mainframe	2	Unit
P.C. Unit	11	Unit
Lap Top	7	Unit
Note Book	26	Unit
Lain –Lain	6	Unit
CPU	12	Unit
Hard Disk	18	Unit
Printer	18	Unit
Computer Compatible	1	Unit
Monitor	5	Unit
Scanner	2	Unit
Meja Rapat Pejabat Eselon III	1	Unit
Meja Tamu Ruang Tunggu Pejabat Eselon III & Meja Tamu Biasa	2	Unit
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	Unit
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	11	Unit
Kursi Kerja Pejabat Eselon V	3	Unit
Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	38	Unit
Biffet Kayu	2	Unit
Proyektor + Attachment	6	Unit
Digital AudioTape Recorder	4	Unit
Alat Studio dan Komunikasi . Lain-lain	6	Unit

SARANA	JUMLAH	
Printer	1	Unit
Alat Studio dan Komunikasi . Lain-lain	1	Unit
Sound System	1	Unit
Telephone (PABX)	1	Unit
Pesawat Telepon	1	Unit
Facsimile	1	Unit
Alat Laboratorium. Buret/Peralatan Titrasi	2	Unit

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 -2021

Perencanaan strategis mengandung tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perubahan dan perkembangan masa depan. Perencanaan strategis ini di perlukan untuk : (1) Merencanakan dan melakukan perubahan strategis (2) Mengelola keberhasilan (3) Orientasi pada masa depan (4) Adaptasi atau adanya fleksibilitas dalam perencanaan maupun pendekatan terhadap perkembangan untuk memanfaatkan peluang yang ada (5) Mewujudkan pelayanan prima (6) meningkatkan komunikasi.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan bagian yang terintegrasi dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang memiliki relevansi terhadap pengungkapan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga. Renstra Bappelitbangda kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 yang mengacu kepada RPJMD tahun 2016-2021, menunjukkan komitmen yang berisi tujuan dan sasaran yang akan dicapai, strategi dan faktor pendukungnya. Dokumen ini merupakan perangkat manajemen yang penting untuk mengefektifkan agenda reposisi dan revitalisasi BAPPELITBANGDA yang telah dicanangkan sebagai komitmen bersama seluruh jajaran BAPPELITBANGDA. Fungsi Renstra adalah sebagai pedoman bagi BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga dalam rangka meningkatkan perannya sebagai organisasi publik yang memberikan pelayanan jasa di bidang perencanaan dan pembinaan perencanaan kepada seluruh SKPD yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pencapaian kinerja pembangunan di daerah.

BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma pencapaian tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap adanya peluang yang timbul dari adanya tantangan tersebut. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu menjadi “*think tank*” dan “*engine of tomorrow*” di bidang perencanaan dan Penelitian-Pengembangan daerah, maka BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome* dan dalam hal ini perencanaan program pembangunan daerah telah tertuang didalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan pembangunan, Visi yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan, adapun Visi jangka menengah RPJMD Kabupaten Purbalingga 2016-2021 adalah :

## **"PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA"**

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021, sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur /sarana prasarana wilayahan yang memadai
7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup

### **B. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Bappeda Kab. Purbalingga**

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan daerah dan Litbang, Bappelitbangda secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan / kajian pembangunan daerah, pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappelitbangda dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2016– 2021 terutama dalam pencapaian misi pertama, dijabarkan sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

**Tujuan dan sasaran rencana strategis Bappeda Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan, yang ditandai dengan masuknya Purbalingga sebagai nominator Anugerah Pangripta Abipraya	Meningkatnya kapasitas perencanaan daerah	Nilai evaluasi AKIP	Membangun SDM apartur dan pendukung sarana perencana yang berkualitas	Peningkatan SDM apartur dan pendukung sarana perencana yang berkualitas
		Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklajuti		
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
Terwujudnya Keselarasan pembangunan daerah	Terwujudnya Keselarasan pembangunan daerah	Tingkat Aspirasi Masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen penganggaran	Membangun komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan lintas stakeholders untuk menaati prosedur dan jadwal proses penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan kualitas monitoring dan evaluasi perencanaan
		Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD		
		Tingkat keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Tingkat keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD		
		Tingkat Pencapaian Target Kinerja sasaran Pembangunan		
Penguatan kelembagaan inovasi daerah yang ditandai dengan masuknya inovator Purbalingga menjadi nominator krenova	Meningkatnya kapasitas penelitian dan pengembangan iptek daerah	Jumlah rekomendasi hasil kelitbangan	Membangun komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan lintas stakeholders kelitbangan untuk meningkatkan kualitas hasil kelitbangan yang sesuai kebijakan pembangunan daerah	Fasilitasi penerapan berbagai hasil kegiatan kelitbangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan nilai tambah produk dan daya saing daerah melalui sistem inovasi daerah
		Jumlah jaringan kemitraan pemerintah daerah dengan lembaga iptek		

### C. Program

Program dan kegiatan dalam lima tahun mendatang didasarkan pada mandat yang diperoleh dari Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional beserta aturan pelaksanaannya dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 ttg Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi beserta aturan pelaksanaannya. Program dan kegiatan yang dilakukan BAPPELITBANGDA menggambarkan domain BAPPELITBANGDA dalam perencanaan daerah dan litbang yang meliputi *capacity building*, penyusunan dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi serta penyiapan data dan informasi daerah, penyediaan referensi empiris bagi perencanaan pembangunan serta pengembangan inovasi daerah, pengembangan lingkungan dan mendorong iklim yang kondusif bagi berkembangnya industri berbasis litbang. Dengan mempertimbangkan program yang tertuang dalam RPJMD kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021 maka RENSTRA BAPPELITBANGDA berisi 4 program yakni :

- 1) Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah
- 2) Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 3) Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- 4) Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

### D. Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2017

Dalam rencana kinerja BAPPELITBANGDA Tahun 2017 memiliki sasaran , indikator dan target yang hendak dicapai adalah sebagai mana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Rencana Kerja  
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah  
Kabupaten Purbalingga  
Tahun 2017

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
Meningkatnya kapasitas perencanaan daerah	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti	100 persen ditindaklanjuti
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>TARGET</b>
Terwujudnya Keselarasan pembangunan daerah	Tingkat Aspirasi Masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen penganggaran	35 persen
	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	100 persen
	Tingkat keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD	100 persen
	Tingkat keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD	100 persen
	Tingkat Pencapaian Target Kinerja sasaran Pembangunan	100 persen
Meningkatnya kapasitas penelitian dan pengembangan iptek daerah	Jumlah rekomendasi hasil kelitbangan	2 dok
	Jumlah jaringan kemitraan pemerintah daerah dengan lembaga iptek	6 mitra

#### **E. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017**

Setelah melalui berbagai tahapan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, rencana kinerja tahunan Tahun 2017, telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang akan disepakati antara kepala BAPPEDA dengan kepala daerah Tahun 2017, yaitu sebagaiberikut :

**Tabel 2.3**  
**PERJANJIAN KERJA BAPPELITBANGDA**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**  
**TAHUN 2017**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya kapasitas perencanaan daerah	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti	100 % ditindaklanjuti
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik
2	Terwujudnya Keselarasan pembangunan daerah	Tingkat Aspirasi Masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen penganggaran	35 persen
		Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	100 persen sesuai
		Tingkat keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD	100 persen sesuai
		Tingkat keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD	100 persen sesuai
		Tingkat Pencapaian Target Kinerja sasaran Pembangunan	100 persen tercapai
3	Meningkatnya kapasitas penelitian dan pengembangan iptek daerah	Jumlah rekomendasi hasil kelitbangan	4 rekomendasi
		Jumlah jaringan kemitraan pemerintah daerah dengan lembaga iptek	6 mitra

<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>
<b>Program Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>1.843.751.000</b>
1 Evaluasi RKPD Tahun 2017	82.055.000
2 Fasilitasi FEDEP	139.715.000
3 Fasilitasi Green Economy and Locally Appropriate Mitigation Action Program In Indonesia (GELAMA I)	130.000.000
4 Fasilitasi Kuliah Kerja Nyata	175.000.000
5 Fasilitasi Program Kota Hijau, Eco Distrik dan P3KP	92.600.000
6 Fasilitasi PUS	74.790.000
7 Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Ban-Gub)	192.071.000
8 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	139.805.000
9 Koordinasi dan Sinkronisasi Program Keciaptakaryaan dan Penataan Ruang Daerah	74.695.000
10 Pelaporan dan Rekonsiliasi Kegiatan TP, DAK dan Bangub	79.725.000
11 Pendampingan Program WISMP	128.700.000
12 Pendampingan Program-Program Pemberdayaan Masyarakat	59.935.000
13 Penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Manusia	75.000.000
14 Penyusunan Evaluasi Makro Ekonomi Daerah	99.660.000
15 WISMP	300.000.000
<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>944.635.000</b>
1 Fasilitasi SIMRENDA	69.800.000
2 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Ekonomi	49.805.000
3 Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan Bidang Energi Sumber Daya Mineral Lingkungan Hidup dan Prasarana Wilayah	25.000.000
4 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Perencana	41.440.000
5 Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2017	70.000.000
6 Penyusunan KUA PPAS Perubahan Tahun 2017	119.850.000
7 Penyusunan KUA PPAS Tahun 2018	124.720.000

<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>
8 Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	50.000.000
9 Penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2017	119.500.000
10 Penyusunan RKPD Tahun 2018	199.700.000
11 Review Rencana Program Investasi jangka menengah (RPIJM) Keciptakaryaan	74.820.000
<b>Program Penelitian dan Pengkajian Daerah</b>	<b>452.085.000</b>
1 Analisis Perekonomian Daerah Hasil Sensus Ekonomi 2016	68.955.000
2 Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Daerah	150.000.000
3 Penguatan Sistem Inovasi Daerah	74.820.000
4 Peningkatan SDM Litbang dalam Metodologi Penelitian	25.000.000
5 Penyusunan Evaluasi Ekonomi dan Kesra	68.260.000
6 Survey Potensi Klaster Ekonomi Kerakyatan	65.050.000
<b>Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah</b>	<b>996.480.000</b>
1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	285.227.000
2 Penataan Arsip	20.000.000
3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	20.000.000
4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	102.000.000
5 Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	322.058.000
6 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	40.000.000
7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	207.195.000
<b>Jumlah</b>	<b>4.236.951.000</b>

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pengungkapan informasi kinerja saat ini relevan dengan perubahan paradigmapenganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*output*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcome*) dari setiap program. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Renstra BAPPEDA. Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil.

Analisis pencapaian kinerja dimaksudkan untuk menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra). Instansi pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi kinerja tersebut dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

Kinerja Bappeda Kabupaten Purbalingga tahun 2016 tergambar dari capaian kinerja sasaran, serta program dan kegiatan, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Tapkin tahun 2016. Penghitungan capaian kinerja kegiatan sebagaimana mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

- > 101 = Amat Baik
- 80 - 100 = Baik
- 50 - 79 = Cukup
- < 49 = Kurang

Hingga akhir tahun 2017, BAPPELITBANGDA telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut :

1. Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan,  
Dalam mencapai tujuan tersebut pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Purbalingga menduduki peringkat ke 14 dalam penilaian pangripta abripraya dari target Renstra 2016 - 2021 menjadi

nominator anugrah abipraya (10 besar). Dalam pencapaian kualitas perencanaan sasaran yang telah dicapai pada tahun 2017 adalah :

- a. Meningkatnya kapasitas perencanaan daerah yang ditandai oleh Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- b. Terwujudnya Keselarasan pembangunan daerah yang ditandai oleh Tingkat Aspirasi Masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen penganggaran, Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD, Tingkat keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD, Tingkat keselarasan Renja SKPD terhadap RKPDP, dan Tingkat Pencapaian Target Kinerja sasaran Pembangunan

Secara lengkap indikator sasaran dalam perwujudan kualitas perencanaan dapat dijelaskan secara berturut-turut dibawah ini.

#### 1.1. Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti

Capaian Indikator persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti pada tahun 2017 adalah 100 persen ditindaklanjuti. Capaian ini sama dengan capaian tahun 2016.

#### 1.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan Bappelitbangda terkait dengan pelayanan perijinan dan pelayanan Kuliah kerja Nyata. Nilai indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2017 mencapai nilai baik atau 83 sama dengan tahun 2016 tetapi skornya naik dari 79,68. Nilai ini diukur melalui survey atas kelengkapan dan kenyamanan ruang pelayanan, kualitas dan sikap petugas pelayanan, kesesuaian harapan atas subtansi kunjungan, tingkat efisiensi atas proses pelayanan. Sedangkan survey atas pungutan liar pada pelayanan Bappelitbangda tidak ada stupun yang menyampaikan terjadi pungutan liar.

#### 1.3. Tingkat Aspirasi Masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen penganggaran

Indikator tingkat aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam anggaran diukur dari usulan yang masuk melalui proses musrenbang RKPDP. Target yang dipasang pada indikator ini adalah 35 persen. Target ini disusun berdasarkan pada tingkat capaian eksisting tahun 2015 dan juga mempertimbangkan bahwa perencanaan selain melalui pendekatan partisipatif juga melalui pendekatan politis, teknokratis serta bawah atas – atas bawah. Realisasi pada tahun 2017 sebesar 24.7 persen atau 52 kegiatan dari 201 usulan, sehingga capaian kienrjanya sebesar 70,57 atau naik dari tahun 2016 yang sebesar 65,71.

#### 1.4. Tingkat keselarasan RKPDP terhadap RPJMD

Indikator tingkat keselarasan RKPDP terhadap RPJMD diukur berdasarkan jumlah program RPJMD yang dilaksanakan oleh RKPDP dibagi dengan jumlah Program dalam RPJMD. Realisasi tingkat keselarasan RKPDP terhadap RPJMD pada tahun 2017 adalah 92,98 persen merupakan penerapan 92 program RPJMD di RKPDP dari 98 program yang ada di RPJMD.

#### 1.5. Tingkat keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD

Indikator Tingkat keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD diukur dari kesesuaian program dan keterkaitan sasaran dan tujuan Renstra terhadap RPJMD. Dari 25 OPD yang menangani urusan dan fungsi penunjang serta 18 OPD kecamatan yang berkewajiban menyusun Renstra telah kesemuanya menyusun renstra dan program telah sesuai dengan program RPJMD.

#### 1.6. Tingkat keselarasan Renja SKPD terhadap RKPDP

Indikator tingkat keselarasan Renja SKPD terhadap RKPDP diukur dari kesesuaian program dan kegiatan Renja terhadap RPJMD. Dari 25 OPD yang menangani urusan dan fungsi penunjang

serta 18 OPD kecamatan yang berkewajiban menyusun Renja telah kesemuanya menyusun renja. Sedangkan program dan kegiatan renja telah sesuai dengan program dan kegiatan RKPd. 1.1. Tingkat Pencapaian Target Kinerja sasaran Pembangunan

Indikator ini menghitung tingkat capaian 65 indikator sasaran yang ada pada RPJMD dan RKPd pada tahun 2017. Rata-rata capaian target kinerja sasaran pembangunan pada tahun 2017 adalah sebesar 94,7 persen dari target sebesar 100 persen.

Secara lengkap ikhtisar capaian kinerja sasaran pada tahun 2016 dan 2017 tergambar pada tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1  
Realisasi Sasaran Kinerja  
Bappelitbangda  
Tahun 2017

SASARAN / INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2016			TAHUN 2017		
	TARG ET	REALI SASI	CAPAI AN	TARG ET	REALI SASI	CAPAI AN
Meningkatnya kapasitas perencanaan daerah						
♦ Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti	100 persen ditindaklanjuti	100 persen ditindaklanjuti	100 persen	100 persen	100 persen ditindaklanjuti	100 persen
♦ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik (79,68)	100 persen	Baik (83)	Baik	100 persen
Terwujudnya Keselarasan pembangunan daerah						
♦ Tingkat Aspirasi Masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen penganggaran	35 persen	23 persen	65,71 persen	35 persen	24,7 persen	70,57 persen
♦ Tingkat keselarasan RKPd terhadap RPJMD	100 persen	92/98 (96 persen)	96 persen	100 persen	92/98 (96 persen)	96 persen
♦ Tingkat keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD	Sesuai	Blm tersedia	Blm tersedia	100 persen	100 persen	100 persen
♦ Tingkat keselarasan Renja SKPD terhadap RKPd	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen

SASARAN / INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2016			TAHUN 2017		
	TARG ET	REALI SASI	CAPAI AN	TARG ET	REALI SASI	CAPAI AN
♦ Tingkat Pencapaian Target Kinerja sasaran Pembangunan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	94,7 persen	94,7 persen

Dalam pencapaian sasaran kinerja dimaksud dilakukan melalui serangkaian program dan kegiatan yakni 3 program dan 32 kegiatan. Secara rinci capaian masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 11 kegiatan meliputi:

1) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Perencana

- a. Maksud pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya 3 (tiga) kali pelaksanaan diklat peningkatan kapasitas dan kompetensi perencana bagi aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga
- b. Hasil kegiatan adalah
  - (1) Meningkatnya kemampuan 53 ASN Bappelitbangda dalam melakukan evaluasi kinerja
  - (2) Meningkatnya kemampuan 53 ASN Bappelitbangda dan 6 TAPD/Petugas teknis dalam implementasi Peremndagri 86 tahun 2017.
  - (3) Meningkatnya kapasitas tim 45 ASN Bappelitbangda dalam dalam kerjasama team work
- c. Sasarannya yaitu semua aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga
- d. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 132,640,000.00,- dan realisasinya sebesar Rp. 115,798,500.00,- atau 87,30 %.
- e. Permasalahan yang dihadapi yaitu belum semua PNS dapat hadir pada setiap even karena berbenturan dengan kegiatan lain.
- f. Solusi yang ditempuh adalah ke depan dalam menyusun perencanaan waktu secara menyeluruh.

2) Penyelenggaraan Musrenbang

- a. Dasar Kegiatan:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional , Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
  3. Peraturan Pemerintah no. 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah no. 8 tentang tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu pelaksanaan 18 musrenbangcam, 4 forum OPD dan 1 Musrenbang kabupaten
  - c. Hasil kegiatan : 1 dokumen usulan kecamatan dan 1 dokumen hasil musrenbangkab.
  - d. Anggaran : Rp. 70.000.000,-  
Realisasi : Rp. 59.259.994,- atau (84,66 %)  
Sisa anggaran : Rp. 10.740.006,-
  - e. Permasalahan yang dihadapi : masih banyak usulan-usulan yang tidak sesuai kebutuhan di wilayah (usulan yang bukan yang diprioritaskan).
- 3) Penyusunan RKPD Tahun 2018
- a. Dasar Kegiatan :
    1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional , Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
    2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
    3. Peraturan Pemerintah no. 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
    4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah no. 8 tentang tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 14 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017
  - b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu terfasilitasinya 1 dokumen perbup, 80 buku penyusunan RKPD Tahun 2018, 200 Ranwal, 350 buku Musrenbang.
  - c. Hasil kegiatan : tersusunya draf Rancangan Awal RKPD 2018 , buku RKPD Tahun 2018, buku Musrenbang.
  - d. Anggaran : Rp. 199.700.000,-  
Realisasi : Rp. 199.181.316,- atau (99,74 %)  
Sisa Anggaran Rp. 518.684,-
  - e. Perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan ini sudah melalui dan termuat dalam RPJMD , Renja BAPPELITBANGDA Tahun 2017 dan RKA BAPPELITBANGDA Tahun 2017.
  - f. Permasalahan yang dihadapi : masih banyak OPD dalam pengisian form yang dikirimkan oleh BAPPELITBANGDA cara mengisinya kurang tepat.
  - g. Solusi : Perlunya diadakan pelatihan tentang pengisian form pembuatan renja dan renstra peserta OPD.
  - h. Kondisi sarana prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dalam kondisi baik.
  - i. Hal yang perlu dilaporkan : perlu kerjasama yang lebih baik TIM pengampu OPD.
- 4) Penyusunan KUA PPAS Tahun 2018
  - a. Maksud dari kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran & PPAS Tahun 2018 adalah :
    1. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD, untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD Tahun 2018;
    2. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
    3. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
    4. Menjalin komunikasi yang berkualitas dan berkelanjutan antara eksekutif dan legislatif khususnya dalam rangka penyusunan APBD Perubahan

- b. Hasil kegiatan adalah tersusunnya 80 buku KUA Perubahan Tahun 2017, 80 buku PPAS Perubahan Tahun 2017.
- c. Sasarannya adalah adalah semua SKPD, semua dinas, instansi, kantor, yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Purbalingga.
- d. Anggaran sebesar Rp. 124.720.000 realisasi sebesar Rp. 121.836.601 atau 97,69 persen.
- e. Permasalahan terbitnya undang-undang baru tentang pemerintahan daerah utamanya yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- f. Solusi konsultasi ke pemerintah pusat dan provinsi. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tahun 2017 dalam keadaan baik.
- g. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada.

#### 5) Fasilitasi SIMRENDA

- a. Dasar Kegiatan :
  - 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Publik. Undang-undang No.14 tentang Keterbukaan Publik.
  - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah no. 8 tentang tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
  - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 14 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017
- b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, masih dalam proses.
- c. Hasil kegiatan : Terlaksanya Penanda Tanganan antara Bupati dengan Kepala BBPT Jakarta.
- d. Anggaran           Rp. 112.044.000  
     Realisasi           Rp . 62.498.691,- (55,78%)  
     Sisa anggaran   Rp. 49.545.309
- e. Permasalahan yang dihadapi : masih dalam proses
- f. Solusi : Perlunya diadakan pelatihan-pelatihan bagi tenaga operator di setiap OPD.

#### 6) Penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2017

- a. Dasar Kegiatan :
  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional , Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  3. Peraturan Pemerintah no. 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang PePelaksanaan Peraturan Pemerintah no. 8 tentang tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 14 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017
- b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu terfasilitasinya 1 dokumen perbup, 80 buku RKPD Perubahan Th. 2017, 80 buku Rancangan Akhir Perubahan Th. 2017.
- c. Hasil kegiatan : tersusunya buku RKPD Perubahan Tahun 2017 dan rancangan akhir Perubahan 2017.
- d. Anggaran : Rp. 119.500.000,-  
 Realisasi : Rp. 107.654.214,- atau (90,09 %)  
 Sisa Anggaran Rp. 11.845.786,-
- e. Perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan ini sudah melalui dan termuat dalam RPJMD , Renja BAPPELITBANGDA Tahun 2017 dan RKA BAPPELITBANGDA Tahun 2017.
- f. Permasalahan yang dihadapi : masih banyak OPD dalam pengisian form yang dikirimkan oleh BAPPELITBANGDA cara mengisinya kurang tepat
- g. Solusi : Perlunya diadakan pelatihan tentang pengisian form pembuatan renja dan renstra peserta OPD
- h. Kondisi sarana prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dalam kondisi baik.
- i. Hal yang perlu dilaporkan : perlu kerjasama yang lebih baik lagi dari TIM pengampu di masing-masing OPD.

7) Penyusunan KUA PPAS Perubahan Tahun 2017

- a. Maksud dari kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran & PPAS Perubahan Tahun 2017 adalah
    1. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Perubahan, untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun 2017;
    2. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
    3. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
    4. Menjalin komunikasi yang berkualitas dan berkelanjutan antara eksekutif dan legislatif khususnya dalam rangka penyusunan APBD Perubahan
  - b. Hasil kegiatan adalah tersusunya 80 buku KUA Perubahan Tahun 2017, 80 buku PPAS Perubahan Tahun 2017.
  - c. Sasarannya adalah adalah semua SKPD, semua dinas, instansi, kantor, yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Purbalingga.
  - d. Anggaran sebesar Rp.128.600.000,- realisasi Rp.126.320.749,- (98,23%)
  - e. Permasalahan terbitnya undang-undang baru tentang pemerintahan daerah utamanya yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
  - f. Solusi konsultasi ke pemerintah pusat dan provinsi.
  - g. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tahun 2017 dalam keadaan baik.
  - h. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada.
- 8) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
- a. Maksud dan Tujuan :
    1. Amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, khususnya Pasal 63 (ayat 3) yang menyebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun;
    2. Menjadi panduan dan arahan serta acuan bagi institusi pemerintah, lembaga/organisasi masyarakat dan swasta pada tataran Kabupaten yang dilandasi komitmen bersama untuk mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia Purbalingga melalui perbaikan pangan dan gizi.
    3. Sebagai pijakan bagi pemerintah daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat demi perbaikan kualitas sumber daya manusia Indonesia khususnya di Purbalingga.
  - b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 

Terlaksananya kegiatan penyusunan dokumen Rencana Aksi Pangan dan Gizi di Kabupaten Purbalingga.
  - c. Hasil Kegiatan
 

Tersusunnya 15 buku Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi di Kabupaten Purbalingga.
  - d. Sasaran :

Sasaran dari kegiatan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi ini adalah :

1. Masyarakat di seluruh Kabupaten Purbalingga;
  2. OPD dan para pemangku kepentingan terkait di Kabupaten Purbalingga.
- e. Target dan Realisasi Keuangan
- Anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- sampai dengan Desember 2017 realisasi kegiatan sebesar 100%, dan realisasi anggaran sebesar Rp. 35.875.792,- (71,75%).
- f. Permasalahan yang Dihadapi :
1. Masih terdapatnya kasus Balita Gizi Kurang (Underweight), Balita Pendek (Stunting), dan Balita Kurus (wasting).
  2. Masih rendahnya budaya diversifikasi konsumsi pangan beragam yang Bergizi Berimbang Sehat dan Aman (B2SA) di masyarakat, yang disebabkan masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran terhadap upaya perbaikan gizi, karena faktor pendapatan dan daya beli sebagian masyarakat yang juga masih rendah.
  3. Semakin terbatas sumberdaya alam pertanian sehingga mengancam terpenuhinya ketersediaan pangan dan berpotensi dilakukannya impor.
  4. Kebijakan dan program terkait perbaikan gizi masih terfragmentasi akibat kurangnya koordinasi dan belum dilaksanakannya pendekatan multi-sektor.
- g. Upaya Pemecahan Masalah
1. Perlunya identifikasi dan inventarisasi permasalahan pangan dan gizi.
  2. Perlunya penanganan masalah pangan dan gizi yang melibatkan multisektor melalui intervensi spesifik maupun sensitif dalam rangka percepatan perbaikan permasalahan pangan dan gizi.
- h. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
- Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tahun 2017 dalam keadaan baik.
- i. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan
- Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada

## 9) Review Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)

- a. Maksud dari Kegiatan Review Rencana Program Investasi Jangka Menengah ( RPIJM ) Keciptakarya

Seiring dengan perkembangan pembangunan nasional dibidang Keciptakarya yang terus berkembang menuntut untuk setiap kabupaten/kota mengikuti dan mensinkronkan kegiatan kabupaten dengan kegiatan Pusat maupun propinsi dibidang keciptakarya. RPIJM kabupaten purbalingga yang telah lama tidak di tinjau kembali maka perlu Review Rencana Program Investasi Jangka Menengah ( RPIJM ) Keciptakarya.

Tujuannya adalah untuk:

1. Mengsynchronkan RPIJM Kabupaten Purbalingga dengan Pusat maupun Propinsi;
  2. Memuat kegiatan usulan yang belum masuk ke dalam RPIJM Keciptakaryaannya untuk diusulkan ke Propinsi maupun Pusat;
  3. Membagi kewenangan pendanaan kegiatan yang diusulkan dalam RPIJM;
- b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan:
- Terlaksananya Review Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Keciptakaryaannya untuk panduan dan sarana usulan program keciptakaryaannya. Tersusunnya dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Keciptakaryaannya Kabupaten Purbalingga.
- c. Hasil kegiatan : Tersusunnya dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Keciptakaryaannya Kabupaten Purbalingga..
- d. Sasaran : Terlaksananya Review Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Keciptakaryaannya sebagai pedoman kegiatan maupun usulan untuk OPD yang menangani bidang keciptakaryaannya.
- e. Anggaran : Rp.74.820.000,- (Tujuh puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)  
Realisasi : Rp.68.045.818,- (Enam puluh delapan juta empat puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah)  
Sisa anggaran : Rp. 6.774.182,- (Enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh dua rupiah)
- f. Permasalahan: Masih banyak OPD yang tidak mengusulkan kegiatan di dalam Review Rencana Program Investasi Jangka Menengah ( RPIJM ) Keciptakaryaannya yang ;
- g. Solusi: Usulan kegiatan yang belum masuk dimasukkan dalam matrik usulan RPIJM Keciptakaryaannya;
- h. Kegiatan Review Rencana Program Investasi Jangka Menengah ( RPIJM ) Keciptakaryaannya menjadi pedoman dalam usulan bidang keciptakaryaannya.

#### 10) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Ekonomi

- a. Maksud Kegiatan:
1. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan serta pengidentifikasian akan kemajuan kegiatan pembangunan Bidang Ekonomi Tahun 2017 meliputi ketepatan sasaran (obyek) dan lokasi pelaksanaan kegiatan, tingkat efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya (input), pencapaian keluaran dari kegiatan tersebut (output);
  2. Melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan/program pembangunan di bidang ekonomi dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut yang meliputi terhadap hasil (outcome) dan sisi manfaat (benefit) dari pelaksanaan kegiatan tersebut;
  3. Menilai aspek kesesuaian antara proses pelaksanaan dengan rencana kegiatan yang telah dilakukan

4. Mendapatkan data-data dan fakta sebagai inform decision guna menetapkan tindak lanjut atau intervensi yang diperlukan oleh semua pelaku pembangunan bidang ekonomi yang berkepentingan untuk kemudian dibuatkan dalam laporan secara berkala terhadap hasil pelaksanaan monev tersebut serta menyusun laporan akhir.
  - b. Hasil Kegiatan: Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Bidang Ekonomi Tahun 2017 yang berisi hasil Focus Group Discussion (FGD) sektor Pariwisata dan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi serta dokumentasi dan masukan hasil dari kunjungan ke lapangan.
  - c. Sasaran Kegiatan : Program dan kegiatan dalam pembangunan di rumpun bidang ekonomi diantaranya sektor pertanian dalam arti luas, perikanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, pariwisata, koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM), dan penanaman modal.
  - d. Anggaran Rp. 49.805.000,- Realisasi Anggaran : Rp. 48,396,930,- (97.17%). Sisa anggaran Rp. 1.408.070,-
  - e. Permasalahan yang dihadapi : Diantaranya adalah dikarenakan luasnya lingkup kegiatan pembangunan di bidang ekonomi yang akan di monev serta keterbatasan waktu dan personel yang ada, sehingga tidak semuanya program dan kegiatan dapat dilakukan monitoring dan evaluasi
  - f. Solusi yang ditempuh : Dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar lintas SKPD, rapat-rapat teknis serta desk untuk menggali informasi dengan semua personel di OPD dalam rumpun bidang ekonomi serta menyusun schedule yang bisa terintegrasi dengan kegiatan yang ada di SKPD rumpun bidang ekonomi agar dapat mengefektifkan kegiatan dan personel serta mengefesiensikan dari sisi waktu pelaksanaan
  - g. Kondisi sarana dan prasarana : Sangat baik dan mendukung terlaksananya kegiatan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan
  - h. Hal-hal yang perlu dilaporkan : Tidak ada
- 11) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Energi Sumberdaya Mineral, Lingkungan Hidup dan Prasarana Wilayah
- a. Maksud dari Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Energi Sumberdaya Mineral, Lingkungan Hidup dan Prasarana Wilayah  
 Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas perencanaan pembangunan bidang energi sumberdaya mineral, lingkungan hidup dan prasarana wilayah, maka perlu dilaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang Energi Sumberdaya Mineral, Lingkungan Hidup dan Prasarana Wilayah untuk mendapatkan output yang optimal sebagai dasar perencanaan dan pembangunan, khususnya dalam bidang energi sumberdaya mineral, lingkungan hidup dan prasarana wilayah. Tujuannya adalah untuk:
    1. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang Energi Sumberdaya Mineral, Lingkungan Hidup dan Prasarana Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017, yang antara lain meliputi ketepatan sasaran (obyek) dan lokasi kegiatan, efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumberdaya (input), serta pencapaian keluaran (output) kegiatan;

2. Melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan, yang meliputi hasil (outcome) dan manfaat (benefit) kegiatan tersebut;
  3. Melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan/program pembangunan bidang energi sumberdaya mineral, lingkungan hidup dan prasarana wilayah;
  4. Menyampaikan laporan secara berkala hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta menyusun laporan akhir.
- b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan: Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang energi sumberdaya mineral, lingkungan hidup dan prasarana wilayah Kabupaten Purbalingga terhadap pelaksanaan pembangunan yang sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, maupun pembangunan yang dilaksanakan pada tahun kegiatan.
- c. Hasil kegiatan: Terpantau dan terinventarisirnya permasalahan-permasalahan pembangunan pada bidang energi sumberdaya mineral, lingkungan hidup dan prasarana wilayah Kabupaten Purbalingga, sehingga memudahkan dalam melakukan evaluasi kebijakan program pembangunan bidang energi sumberdaya mineral, lingkungan hidup dan prasarana wilayah ke depannya.
- d. Sasaran: Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang energi sumberdaya mineral, lingkungan hidup dan prasarana wilayah Kabupaten Purbalingga terhadap pelaksanaan pembangunan yang sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, maupun pembangunan yang dilaksanakan pada tahun kegiatan.
- e. Anggaran: Rp.39.530.000,- (Tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)  
Realisasi : Rp 29.104.500,- (73,63 %) ; Sisa anggaran : Rp 10.425.500,-
- f. Permasalahan:
1. Masih ditemuinya pelaksanaan yang tidak sesuai dengan jadwal (schedule) yang telah ditetapkan;
  2. Kekurangan personil serta padatnya aktifitas dan kegiatan monitoring dan evaluasi yang telah disusun mengalami perubahan dan re-scheduling, sehingga hasil kegiatan perlu lebih dioptimalkan.
- g. Solusi:
1. Meningkatkan evaluasi kegiatan melalui pelibatan tim internal yang lebih intensif dan terpadu terkait dengan kegiatan pembangunan yang sedang berjalan;
  2. Optimalisasi koordinasi dengan OPD terkait guna peningkatan hasil monitoring dan evaluasi yang lebih optimal terkait kegiatan pembangunan yang sedang berjalan;
  3. Perlu adanya tindak lanjut atas hasil kegiatan pembangunan guna perencanaan pembangunan ke depannya.
  4. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang Energi Sumberdaya Mineral, Lingkungan Hidup dan Prasarana Wilayah masih diperlukan dalam rangka pemantauan pelaksanaan pembangunan dan memotret permasalahan riil dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan fisik yang ada di Kabupaten Purbalingga.

b. Program Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Program Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari 15 kegiatan meliputi:

- 1) Pelaporan dan Rekonsiliasi Kegiatan TP, DAK, dan Bangub
  - a. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
  - b. Hasil kegiatan : pelaporan berkala kegiatan TP, DAK dan BanGub
  - c. Anggaran : Rp. 79.725.000,- ; realisasi : Rp. 76.821.875,- (96,36%); sisa anggaran : Rp. 2.903.125,-
  - d. Perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan ini sudah melalui dan termuat dalam RPJMD, Renja BAPPELITBANGDA Tahun 2017 dan RKA BAPPELITBANGDA Tahun 2017
  - e. Permasalahan yang dihadapi: masih banyak OPD yang melakukan pelaporan yang kurang tepat waktu sehingga laporan ke provinsi dan pusat kurang optimal
  - f. Solusi : perlunya dibuat aplikasi khusus pelaporan dana TP, DAK, dan BanGub agar pelaporannya tepat waktu dengan cara online.
  - g. Kondisi sarana Prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut belum tersedia
  - h. Hal yang perlu dilaporkan : perlu kerjasama yang lebih baik lagi dari TIM pengampu Dana TP, DAK dan Bangub di masing- masing OPD.
- 2) Evaluasi RKPD 2017
  - a. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu terlaksananya penyusunan data evaluasi RKPD tahun 2017 dalam bentuk buku sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun Anggaran Pemerintah Daerah
  - b. Hasil kegiatan : tersusunya buku evaluasi RKPD 2017 sebanyak 15 buah buku
  - c. Anggaran : Rp. 82.055.000,- ; Realisasi : Rp. 74.663.500,- (90,99%) ; sisa anggaran : Rp. 7.391.500,-
  - d. Permasalahan yang dihadapi : masih banyak OPD yang dalam pengisian form yang dikirimkan oleh BAPPELITBANGDA cara mengisinya kurang tepat, dan tidak sesuai bahkan merubah isian tanpa mengacu pada permendagri 54 tahun 2010 dan permendagri 86 tahun 2017
  - e. Solusi : perlunya diadakan pelatihan dan sosialisasi khusus tentang pengisian form pembuatan renja dan renstra RKPD, bagi OPD di lingkungan pemerintah daerah
  - f. Kondisi sarana prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dalam kondisi baik
  - g. Hal yang perlu dilaporkan : perlu kerjasama yang lebih baik lagi dari TIM pengampu dimasing masing OPD
- 3) WISMP
  - a. Anggaran :
    1. WISMP Loan No. 8027 – ID = Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah);
  - b. Maksud Kegiatan : Program WISMP dilaksanakan untuk menguatkan kelembagaan pengelolaan sumber daya air, khususnya di wilayah sungai, mata

air dan badan air lainnya untuk sektor irigasi pertanian dalam menjaga keandalan fungsi irigasi pertanian guna penyediaan air. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya air bukan semata-mata merupakan tanggung jawab pemerintah pusat melainkan seluruh masyarakat dan pemerintah daerah karena itu peran petani sangat penting dalam pemeliharaan irigasi yang dibentuk dalam wadah Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A), Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Selain itu Pendampingan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan Koordinator Tenaga Pendamping Masyarakat (KTPM).

- c. Hasil Kegiatan :
    - 1. Pendampingan kelembagaan GP3A/P3A oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan Koordinator Tenaga Pendamping Masyarakat (KTPM).
    - 2. Penguatan sekretariat Komisi Irigasi melalui rapat-rapat koordinasi.
    - 3. Pelatihan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I)
    - 4. Penyusunan dokumen profil Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI) dan Success Story kegiatan WISMP II.
  - d. Sasaran Kegiatan:

Meningkatkan peran serta petani dalam wadah organisasi/kelembagaan P3A, GP3A, IP3A dan KOMIR dalam pemeliharaan dan pengelolaan serta pengembangan jaringan irigasi pertanian.
  - e. Realisasi Anggaran : WISMP Loan = Rp 249.567.701,- (dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus satu rupiah) atau sebesar 83,19%. Dengan sisa anggaran Rp. 50.432.299,-
  - f. Permasalahan yang dihadapi : Dengan berakhirnya program WISMP di tahun 2017, perlu penyiapan pelaksanaan replikasi program untuk tahun selanjutnya. Namun hal ini banyak menemui kendala dan permasalahan diantaranya internalisasi program pada mekanisme penganggaran belum optimal, dan belum seluruh stakeholders memahami tentang pentingnya replikasi PPSIP.
  - g. Solusi yang ditempuh :Melaksanakan koordinasi dan komunikasi secara efektif pada seluruh stakeholders baik di daerah maupun ke Pusat. Menjaga keberlanjutan program baik pemberdayaan kelembagaan petani (P3A, GP3A, IP3A, KOMIR) maupun program fisik pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi secara PPSIP.
  - h. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan : Cukup baik dan mendukung terlaksananya kegiatan.
  - i. Hal-hal yang perlu dilaporkan : Tidak ada
- 4) Pendampingan WISMP
- a. Anggaran : Pendampingan Program WISMP (APBD) = Rp. 83.852.000,-
  - b. Maksud Kegiatan : Program WISMP dilaksanakan untuk menguatkan kelembagaan pengelolaan sumber daya air, khususnya di wilayah sungai, mata air dan badan air lainnya untuk sektor irigasi pertanian dalam menjaga keandalan fungsi irigasi pertanian guna penyediaan air. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya air bukan semata-mata merupakan tanggung jawab pemerintah pusat melainkan seluruh masyarakat dan pemerintah daerah karena

itu peran petani sangat penting dalam pemeliharaan irigasi yang dibentuk dalam wadah Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A), Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Selain itu Pendampingan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan Koordinator Tenaga Pendamping Masyarakat (KTPM).

- c. Hasil Kegiatan :
  - 1. Pendampingan kelembagaan GP3A/P3A oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan Koordinator Tenaga Pendamping Masyarakat (KTPM).
  - 2. Penguatan sekretariat Komisi Irigasi melalui rapat-rapat koordinasi.
  - 3. Pelatihan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I)
  - 4. Penyusunan dokumen profil Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI) dan Success Story kegiatan WISMP II.
- d. Sasaran Kegiatan : Meningkatkan peran serta petani dalam wadah organisasi/kelembagaan P3A, GP3A, IP3A dan KOMIR dalam pemeliharaan dan pengelolaan serta pengembangan jaringan irigasi pertanian.
- e. Realisasi Anggaran : Pendampingan Program WISMP (APBD) = Rp 77.781.328,- (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah), atau sebesar 92,76% (enampuluh koma empat persen). Sisa anggaran Rp. 6.070.672,-
- f. Permasalahan yang dihadapi : Dengan berakhirnya program WISMP di tahun 2017, perlu penyiapan pelaksanaan replikasi program untuk tahun selanjutnya. Namun hal ini banyak menemui kendala dan permasalahan diantaranya internalisasi program pada mekanisme penganggaran belum optimal, dan belum seluruh stakeholders memahami tentang pentingnya replikasi PPSIP.
- g. Solusi yang ditempuh : Melaksanakan koordinasi dan komunikasi secara efektif pada seluruh stakeholders baik di daerah maupun ke Pusat. Menjaga keberlanjutan program baik pemberdayaan kelembagaan petani (P3A, GP3A, IP3A, KOMIR) maupun program fisik pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi secara PPSIP.
- h. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan: Cukup baik dan mendukung terlaksananya kegiatan.
- i. Hal-hal yang perlu dilaporkan : Tidak ada

## 5) NANGKIS (Ban- Gub)

### a. Pelaksanaan

#### - Input

- 1. Dana APBD Kab.Purbalingga : Rp. 130.000.000,-
- 2. Dana APBD Provinsi/BanGub: Rp. 50.000.000,
- 3. Realisasi Penyerapan Anggaran : Rp.170,477,575.- (94,71%)

#### - Output

Kegiatan Fasilitasi TKPK digunakan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan acara FGD Kemiskinan dengan narasumber dari TKPK Kabupaten Kebumen tanggal 21 Januari 2017 di Aula Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga;
2. Menyelenggarakan FGD Kemiskinan tanggal 6 Maret 2017 di Aula Bappelitbangda;
3. Menyelenggarakan sosialisasi pengurangan subsidi listrik tanggal 17 Maret 2017 di Aula Bappelitbangda;
4. Menyelenggarakan rakor Kemiskinan tanggal 20 Maret 2017 di Aula Bappelitbangda;
5. Menghadiri desk verifikasi RKO Bangub tanggal 17-19 April 2017 di Purwokerto;
6. Menyelenggarakan Pelatihan Pemanfaatan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM) untuk Program Perlindungan Sosial di Kabupaten Purbalingga dengan Narasumber dari TNP2K bertempat di Aula Bappelitbangda selama 3 (tiga) hari tanggal 18 – 21 April 2017;
7. Menghadiri desk verifikasi RKO BanGub tanggal 2 Mei 2017 di Semarang;
8. Menghadiri Pertemuan Advokasi Pelayanan Kesehatan Tradisional berlangsung pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 di Semarang;
9. Menghadiri rapat koordinasi Mekanisme Pemutakhiran Mandiri Basis Data Terpadu di Semarang tanggal 3 Mei 2017;
10. Mengikuti Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2017 berlangsung pada hari Rabu dan Kamis tanggal 17 dan 18 Mei 2017 bertempat di Hotel Horison NJ, Semarang;
11. Mengikuti Sosialisasi implementasi Sistem Informasi Manajemen Gangguan Akibat Kekurangan Yodium ( SIM GAKY) berlangsung pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 bertempat di Ruang Sidang Lantai V, Bappeda Prov. Jateng;
12. Menerima kunjungan study banding dari Pemda Wonosobo pada tanggal 27 Juli 2017 di Aula Bappelitbangda;
13. Menyampaikan proposal ke Kemenkes, Ke Kemenpora dan Ke TNP2K Jakarta, pada tanggal 9 – 11 Agustus 2017;
14. Mengikuti Rapat Pembahasan Hasil Pekerjaan tentang “Kajian Program/ Kegiatan untuk Mendukung Capaian Target IPM Jawa Tengah” di Bappeda Provinsi Jawa Tengah tanggal 22 Agustus 2017;
15. Menghadiri Rakor Kemiskinan di TNP2K Jakarta pada tanggal 24 – 26 Agustus 2017;
16. Menghadiri rakor pembangunan kependudukan tanggal 30 Agustus 2017 di Semarang;
17. Menghadiri sosialisasi dan klarifikasi kesiapan daerah dalam rangka penerimaan bantuan pengembangan SDA tanggal 6 September s/d 8 September 2017 di Jakarta;

18. Menghadiri Rakor Penguatan Kebijakan Penanganan Kemiskinan melalui Pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Jawa Tengah Tahun 2017 tanggal 27 September 2017 di Ruang Pertemuan Gedung E Lt. IV Setda Prov. Jateng, Semarang;
  19. Menghadiri FGD Penanggulangan Kemiskinan tanggal 2 – 3 Oktober di Semarang;
  20. Melaksanakan rapat persiapan kunjungan Wakil Gubernur Jawa Tengah di ruang rapat Sekda tanggal 17 Oktober 2017;
  21. Menyelenggarakan rapat pembahasan verifikasi data kemiskinan di ruang rapat Bappelitbangda tanggal 18 Oktober 2017 di Aula Bappelitbangda;
  22. Menyelenggarakan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah di ruang Operation Room tanggal 19 Oktober 2017;
  23. Menyelenggarakan Rakor pejabat eselon dua / kepala OPD dipimpin oleh Bupati Purbalingga menindaklanjuti hasil Rakor dengan Wakil Gubernur tanggal 19 Oktober 2017 malam hari bertempat di Ruang Rapat Bupati Gedung Setda Purbalingga;
  24. Ke Bappeda Provinsi Jawa Tengah di Semarang dalam rangka koordinasi dan konsultasi kegiatan nangkis tanggal 26-27 Oktober 2017;
  25. Menghadiri Rapat koordinasi kemiskinan di Bappeda Provinsi Jawa Tengah di Semarang tanggal 2 Nopember 2017;
  26. Workshop Strategi Pemberdayaan Masyarakat Kurang Mampu tanggal 10 – 11 Nopember 2017 di Purbalingga;
  27. Menyelenggarakan rapat koordinasi tim penanggulangan kemiskinan tanggal 11 Nopember 2017 di Aula Bappelitbangda;
  28. Menyelenggarakan rapat koordinasi tim penanggulangan kemiskinan tanggal 19 Desember 2017 di Aula Bappelitbangda;
  29. Menyelenggarakan rapat koordinasi tim penanggulangan kemiskinan tanggal 23 Desember 2017 di Aula Bappelitbangda;
  30. Menyelenggarakan Sosialisasi Pengelolaan Zakat Infaq dan Shodaqoh Bersinergi Dengan Pengentasan Kemiskinan Berbasis Data bekerjasama dengan BAZNAS Kabupaten Purbalingga tanggal 27 Desember 2017 di Aula Bappelitbangda;
- b. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut
- Permasalahan
    - a. Relatif rendahnya capaian kinerja kegiatan dan keuangan disebabkan karena adanya perubahan uraian bantuan Gubernur dari TKPK menjadi Nangkis sehingga mengharuskan ada perubahan uraian di APBD Kabupaten Purbalingga untuk menyesuaikan uraian di Provinsi yang mengakibatkan keterlambatan kegiatan pronangkis.

- b. Masih perlunya penguatan kelembagaan dan koordinasi dalam penanggulangan kemiskinan melalui penguatan TKPK Kabupaten Purbalingga.
- c. Belum semua OPD menggunakan single data dalam penentuan sasaran/targetting program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- d. Perlu ada kajian pembentukan Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan guna mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan pada seluruh OPD.
- e. Dalam rangka akurasi penentuan sasaran / targetting perlu dilakukan data tunggal dan tersosialisasikan kepada seluruh OPD yang mengampu program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

-Rencana tindak Lanjut

- f. Perlu sinergitas dan harmonisasi berbagai program/kegiatan penanggulangan kemiskinan terutama yang berkaitan penentuan fokus dan lokus dengan mempertimbangkan dimensi kewilayahan.
- g. Perlu komitmen dalam penggunaan single data dalam implementasi program dalam rangka akselerasi penurunan angka kemiskinan guna mendukung mendukung pencapaian target nasional, provinsi, kabupaten.
- h. Dalam rangka akselerasi penurunan angka kemiskinan, guna efisiensi dan efektivitas program penanggulangan kemiskinan, maka program dan kegiatan yang harus diutamakan adalah program dan kegiatan yang langsung menasar pada upaya penurunan angka kemiskinan secara langsung, bukan kegiatan yang berdampak tidak langsung.
- i. Perlu peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) terlatih dengan mengadakan pelatihan yang terfokus pada analisis program pencapaian penanggulangan kemiskinan yang dipergunakan untuk pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan secara kewilayahan, sekaligus sebagai bahan evaluasi dan pelaporan.
- j. Perlu ada pertemuan rutin/periodik baik di TKPK Provinsi maupun dengan TKPK Kabupaten/Kota guna membahas perkembangan dan evaluasi penanganan kemiskinan serta updating data capaian terkait kondisi kemiskinan.

c. Target dan Realisasi Keuangan

Adapun target kegiatan sampai dengan Desember 2017 sebesar 100 %, realisasi kegiatan sebesar 97 %, dan realisasi anggaran sebesar Rp. 170,477,575.00 atau 94,71% dengan sisa anggaran Rp. 9,522,425.00

d. Kesimpulan

- a. Kelembagaan TKPK Kabupaten Purbalingga telah melakukan dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan dan program penanggulangan kemiskinan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan. Hal ini perlu terus didorong dan ditingkatkan kinerjanya dalam rangka akselerasi penurunan angka kemiskinan menuju peningkatan kesejahteraan.

- b. Dalam kurun waktu Tahun 2010 – 2016, angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga mengalami penurunan yang cukup signifikan, namun dirasakan capaian akhir angka kemiskinan masih cukup tinggi dan masih di atas rata – rata Provinsi Jawa Tengah, sehingga masih diperlukan upaya yang sinergis dan strategis dalam upaya percepatan penurunan angka kemiskinan. Dengan adanya inisiasi berbagai program strategis penanggulangan kemiskinan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam penurunan angka kemiskinan.
- c. Perlunya penggunaan basis data / database yang valid dan akurat dalam penentuan sasaran program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan sehingga penerima manfaat dapat tepat sasaran.

6) Fasilitasi FEDEP

a. Anggaran

- Anggaran : Rp. 139.715.000.- (Seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah)
- Dana Bantuan Keuangan Provinsi :Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)
- Dana APBD Kab. Purbalingga : Rp. 39.715.000,- (Tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah)

b. Maksud Kegiatan

- Terfasilitasinya berbagai kegiatan pengembangan perekonomian daerah khususnya potensi ekonomi lokal dalam skala UMKM serta peningkatan lapangan kerja dan kesempatan berusaha di daerah;
- Memfasilitasi pengembangan klaster usaha dan kerjasama antara klaster dengan Business Development Services (BDS) di wilayah;
- Terjalinnnya koordinasi dan komunikasi antara pelaku ekonomi lokal dengan pemerintah daerah dalam fungsi diseminasi informasi dan teknologi tepat guna, promosi dan pengembangan produk local
- Mendapatkan data-data, masukan dan rekomendasi sebagai inform decision guna menetapkan tindak lanjut atau pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi lokal serta penciptaan lapangan kerja untuk kemudian dibuatkan dalam laporan secara berkala serta menyusun laporan akhir.

c. Hasil Kegiatan

Dokumen Laporan Akhir Kegiatan FEDEP Tahun 2017 yang berisi hasil kegiatan pelatihan-pelatihan teknis, Rapat Koordinasi dan rapat teknis klaster, Workshop, Focus Group Discussion (FGD) dan Perencanaan pengembangan ekonomi lokal serta dokumentasi dan masukan hasil dari kunjungan ke lapangan di klaster UMKM.

d. Sasaran Kegiatan

Meningkatnya penguatan kelembagaan FEDEP agar tercapainya kesepahaman dalam pengembangan Ekonomi Lokal di Purbalingga sekaligus memberikan dukungan kepada Paguyuban dan Klaster dalam hal pengetahuan, ketrampilan, teknologi, promosi produk, jaringan dan pasar, serta manajemen pengelolaan.

- Selain itu, sasaran lainnya adalah sebagai bentuk kolaborasi terhadap kegiatan FPESD (Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya) Provinsi Jawa Tengah dan FEDEP dari Kabupaten/Kota lainnya se-Jawa Tengah yang antara lain berisi kegiatan seperti pengiriman pelaku UMKM di Klaster dalam berbagai pelatihan, workshop, FGD (Focus Group Discussion), temu klaster pelaku UMKM dan gelar produk unggulan daerah pada event pameran-pameran
- e) Realisasi Anggaran Rp. 132.160.685,- (Seratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) atau sebesar (94,59%) dengan sisa anggaran Rp. 7.554.315,-
  - f) Permasalahan yang dihadapi : Diantaranya adalah dikarenakan usaha UMKM bersifat dinamis dan tergantung peluang pasar sehingga pembinaan dan pengembangan produk ekonomi lokal sering berubah dan berganti, sehingga berimbas pada pelaku usaha yang juga mengikuti perubahan pada sektor usahanya
  - g) Solusi yang ditempuh :Melaksanakan koordinasi dan komunikasi antar lintas OPD dengan melibatkan semua pelaku usaha yang dijadikan role model, rapat-rapat teknis serta desk dan mengadakan pelatihan-pelatihan serta memberikan bantuan untuk pengembangan usaha dan pendampingan ke klaster/pelaku usaha UMKM secara berkesinambungan sampai pelaku usaha tersebut dapat mandiri dan bisa di tiru oleh klaster atau pelaku usaha di sektor usaha UMKM lainnya.
  - h) Kondisi sarana dan prasarana : Sangat baik dan mendukung terlaksananya kegiatan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan
  - i) Hal-hal yang perlu dilaporkan: Tidak ada
- 7) Fasilitasi Green Economy and Locally Appropriate Mitigation Action Program In Indonesia (GELAMA I)
- a. Maksud dan Tujuan :
    1. Mengembangkan skenario-skenario tata guna lahan, rencana aksi ekonomi hijau dan konservasi biodiversitas;
    2. Melakukan pengkajian dan pengukuran tertentu yang dibutuhkan dalam pengumpulan data dan informasi;
    3. Mengumpulkan dan mengorganisir data yang diperlukan untuk perencanaan dan monitoring;
    4. Melakukan analisis data (termasuk data spasial);
    5. Menyusun konsep untuk mengintegrasikan skenario tata guna lahan terpilih kepada rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan kebijakan sektor berbasis lahan;
    6. Memfasilitasi integrasi sistem pemantauan Ekonomi Hijau dan konservasi biodiversitas ke dalam sistem monitoring pembangunan daerah;
    7. Mengolah dan melakukan perhitungan data sebagai bagian dari pemantauan.
  - b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 

Terlaksananya kegiatan penyusunan dokumen strategi pembangunan rendah emisi di Kabupaten Purbalingga.

- c. Hasil Kegiatan
    - 1. Terlaksananya upaya pengembangan ekonomi hijau dan aksi mitigasi lokal khususnya pada sektor berbasis lahan.
    - 2. Terlaksananya analisis data (termasuk data spasial);
    - 3. Terwujudnya skenario-skenario tata guna lahan dan rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca;
    - 4. Tersedianya baseline emisi;
    - 5. Terlaksananya forum konsultasi publik strategi pembangunan rendah emisi di Kabupaten Purbalingga.
    - 6. Tersusunnya buku 20 buku Strategi Pembangunan Rendah Emisi di Kabupaten Purbalingga.
  - d. Sasaran : Sasaran dari kegiatan Gelamai adalah para pemangku kepentingan tata guna lahan di Kabupaten Purbalingga, dan semua SKPD yang terkait dengan sektor berbasis lahan yang berpotensi untuk menimbulkan emisi maupun sekuestrasi gas rumah kaca.
  - e. Target dan Realisasi Keuangan: Anggaran sebesar Rp 101.750.000,- sampai dengan Desember 2017 realisasi kegiatan sebesar 100%, dan realisasi anggaran sebesar Rp. 90.813.711,- (89.25%) serta sisa anggaran Rp. 10,936,289.00
  - f. Permasalahan yang Dihadapi :
    - 1. Belum tumbuhnya kesadaran bahwa perubahan iklim menjadi tanggung jawab seluruh manusia dan diperlukan tindakan mitigasi untuk mengurangi pemanasan global;
    - 2. Belum tersedianya data-data emisi dari seluruh sektor penghasil emisi Gas Rumah Kaca (dari sektor : limbah, energi, pertanian, kehutanan, penggunaan lahan) di tingkat Kabupaten Purbalingga.
  - g. Upaya Pemecahan Masalah
    - 1. Perlu kampanye tentang perubahan iklim dan aksi mitigasi yang tepat melalui workshop, FGD dan konsultasi publik;
    - 2. Perlu inventarisasi sumber-sumber penghasil gas rumah kaca dari sektor limbah, energi, pertanian, kehutanan, penggunaan lahan serta penghitungan emisinya.
  - h. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan: Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tahun 2017 dalam keadaan baik.
  - i. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan: Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada.
- 8) Pendidikan Untuk Semua Bantuan Gubernur (PUS Ban- Gub)
- a. Anggaran: Rp. 74.790.000,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
  - b. Maksud kegiatan:
    - 1. Terlaksananya fasilitasi program PUS di Kabupaten Purbalingga

2. Meningkatkan pemahaman dan penyamaan persepsi tentang pentingnya pelaksanaan Pendidikan Untuk Semua (PUS) di Kabupaten Purbalingga
  3. Penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas, dan kinerja Forum Pendidikan untuk Semua (PUS) sebagai wadah koordinasi antar stakeholder.
  4. Mengkoordinasikan kebijakan dan pengendalian program Pendidikan Untuk Semua di Kabupaten Purbalingga.
  5. Mengidentifikasi dan dan memetakan permasalahan bidang pendidikan di Kabupaten Purbalingga
  6. Sebagai bentuk fasilitasi dan upaya sistematis, terarah, dan terpadu dengan mengintegrasikan dan mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan dalam rangka pencapaian tujuan Pendidikan Untuk Semua.
  7. Diperolehnya sinkronisasi, harmonisasi dan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program PUS sebagai salah satu program penting di bidang pendidikan.
- c. Sasaran Kegiatan
1. OPD yang mengampu program dan kegiatan bidang pendidikan
  2. OPD / Ormas yang mengampu tujuan PUS
  3. BPS dan Kantor Kementerian Agama
  4. UPT Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan
  5. K3S SD dan MKKS SMP, SMA, dan SMK
  6. Kwartir Gerakan Pramuka Pramuka
  7. Para Pengawas dan Penilik Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama
  8. PKBM dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan se Kabupaten Purbalingga.
  9. IGTKI, HIMPAUDI, dan IPI Kab. Purbalingga.
  10. Ketua Ikatan Penilik Indonesia (IPI)
- d. Hasil Kegiatan
1. OPD yang mengampu program dan kegiatan bidang pendidikan
  2. OPD / Ormas yang mengampu tujuan PUS
  3. BPS dan Kantor Kementerian Agama
  4. UPT Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan
  5. K3S SD dan MKKS SMP, SMA, dan SMK
  6. Kwartir Gerakan Pramuka Pramuka
  7. Para Pengawas dan Penilik Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama
  8. PKBM dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan se Kabupaten Purbalingga.
  9. IGTKI, HIMPAUDI, dan IPI Kab. Purbalingga.
  10. Ketua Ikatan Penilik Indonesia (IPI)
- e. Realisasi Anggaran: Rp. 70.321.000 (tujuh puluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah.) atau 94.02 persen dengan sisa anggaran Rp. 4.469.000,-
- f. Permasalahan yang dihadapi:
1. Pelaksanaan kegiatan PUS tidak dilakukan sejak awal tahun anggaran, namun menjelang akhir tahun anggaran. Hal ini disebabkan karena berdasarkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Prov. Jateng pada tanggal

20 Juli 2017, pemanfaatan Ban – Gub PUS tahun 2017 di Kab./Kota agar menunggu sosialisasi dari Dinas Pendidikan Prov. Jateng, dimana Prov. Jateng juga masih menunggu arahan dari Pusat, terutama yang terkait dengan dasar hukum pelaksanaan program. Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Jawa Tengah Pasca – PUS baru dilaksanakan pada tanggal 26 – 27 September 2017 di Salatiga, dan sosialisasi dasar hukum PUS yakni Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) baru dilaksanakan pada tanggal 7 – 8 November 2017 di Salatiga.

2. Tidak semua kegiatan pembangunan pendidikan yang terdapat dalam OPD terpantau dan termonev semuanya;
  3. Perlunya koordinasi yang lebih intensif dan upaya lebih optimal guna peningkatan capaian kinerja pembangunan bidang pendidikan
  4. Perlunya penguatan kelembagaan Pendidikan untuk Semua baik kelembagaan Forum Pendidikan Untuk Semua maupun Sekretariat Forum Pendidikan Untuk Semua.
  5. Perlunya penyediaan data yang valid dan akurat dalam rangka penghitungan capaian target kinerja Pendidikan Untuk Semua
- g. Solusi yang ditempuh
- h. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan : baik dan sangat mendukung penyelesaian pekerjaan
- i. Hal- hal yang perlu dilaporkan tidak ada
- 9) Fasilitasi Kuliah Kerja Nyata
- a. Anggaran : Rp. 225.000.000 ( dua ratus dua puluh lima juta rupiah )
  - b. Maksud kegiatan:
    1. Bahwa salah satu upaya guna akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purbalingga antara lain dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi. Kerjasama ini meliputi implementasi Tridharma Perguruan Tinggi khususnya pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN).
    2. Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan potensi wilayah Kabupaten Purbalingga
    3. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan ilmu pengetahuan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Purbalingga
    4. Memberikan fasilitasi bagi mahasiswa yang melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata di wilayah Kabupaten Purbalingga
    5. Salah satu faktor fundamental dalam pengentasan kemiskinan adalah mengubah perilaku dari masyarakat utamanya di desa, dimana kegiatan mengubah perilaku ini perlu dibudayakan dan tidak langsung terlihat dalam output atau outcome sebuah kegiatan / program. Penguatan kelembagaan desa, davis, posyandu, posdaya, kader kesehatan desa, relawan sosial desa, PPKBD, sub PPKBD/ PKBRT, berbagai macam pelatihan dan penyuluhan bidang pendidikan, kesehatan, hukum, kependudukan/KB, ekonomi, dan berbagai pelatihan lainnya merupakan contoh program kerja mahasiswa KKN yang meskipun tidak kelihatan, dalam jangka panjang sangat berguna

bagi peningkatan kesadaran, perilaku positif dan merupakan bagian dari upaya pengentasan kemiskinan.

6. Mahasiswa KKN merupakan potensi sumber daya yang sangat strategis. Apabila program dan kegiatan mahasiswa KKN diampu oleh OPD dan dianggarkan melalui APBD, akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Kemitraan yang baik antara pemda dan unsur perguruan tinggi merupakan hal positif dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan.
7. Mengoptimalkan mahasiswa KKN untuk membantu kebutuhan OPD / pemda antara lain :
  - Ikut mendistribusikan dokumen kependudukan dari Dinpendukcapil
  - Mengisi form kuesioner dan interview guide bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, ekonomi, dan tematik lain sesuai kebutuhan.
  - Membantu melakukan monitoring dan dokumentasi pada program / kegiatan pembangunan baik yang bersumber APBN, APBD Provinsi / Ban Gub, maupun APBD Kabupaten yang berlokasi di desa KKN.
  - Mahasiswa juga diberikan tugas tambahan untuk :
    - a. mengisi form untuk mengidentifikasi permasalahan masyarakat / desa yang ditemui selama masa KKN.
    - b. Mengisi form untuk mengidentifikasi permasalahan bidang pendidikan (mendata AUS – TS, ruang kelas rusak berat, pendataan fasilitas sekolah), bidang kesehatan (pendataan PMKS, pasung, jambanisasi, PBI, dll), dan berbagai kebutuhan lain yang diperlukan pemda.
- c. Sasaran kegiatan:
  - Mahasiswa dari perguruan tinggi yang melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata di Kabupaten Purbalingga
  - OPD yang mempunyai program dan kegiatan yang dapat disinergikan dengan program dan kegiatan mahasiswa Kuliah kerja Nyata.
  - Para camat, kepala desa, dan masyarakat desa/ kelurahan yang menjadi tuan rumah kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN).
- d. Hasil kegiatan
  1. Terfasilitasinya mahasiswa dari perguruan tinggi yang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Purbalingga.
  2. Terlaksananya / teracarakannya kegiatan penerimaan, penarikan, dan ekspo / pameran hasil kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN)
  3. Terdatanya permasalahan riil dalam masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi masyarakat lengkap dengan narasi dan dokumentasi visual (gambar)
  4. Terdatanya berbagai usulan program yang tepat untuk diterapkan di lingkungan masyarakat melalui KKN
  5. Tersusunya laporan kegiatan KKN tahun 2017
- e. Realisasi anggaran : Rp. 221.333.275,- (dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah). atau 98,37 persen dengan sisa anggaran Rp. 3.666.725,-
- f. Permasalahan yang dihadapi

1. Dalam beberapa kesempatan ditemukan bahwa program kerja mahasiswa KKN tidak melalui observasi langsung dimasyarakat, sehingga kurang aplikatif dan kurang tepat aplikasinya dimasyarakat.
  2. Kurangnya adaptasi dalam masyarakat, personality mahasiswa yang kurang baik, dan ketidakaktifan mahasiswa juga masih ditemui sehingga berpengaruh pada optimalisasi program kerja
  3. Adanya program kerja dalam OPD yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa KKN akan tetapi belum dimanfaatkan karena kurangnya komunikasi dan koordinasi
  4. Cukup pendeknya jangka waktu KKN sehingga program kerja yang dilaksanakan kurang optimal.
- g. Solusi yang ditempuh
1. Membekali mahasiswa dalam penguasaan wilayah dan pembekalan untuk memberikan resep praktis dalam pendekatan sosial sehingga melancarkan pelaksanaan program KKN
  2. Optimalisasi, intensifikasi dan diversifikasi program kerja mahasiswa KKN disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat sehingga menjadikan KKN sebagai program penting bagi masyarakat
  3. Optimalisasi koordinasi dengan OPD terkait guna optimalisasi program kerja KKN di wilayah
- h. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan :  
baik dan sangat mendukung penyelesaian pekerjaan
- i. Hal- hal yang perlu dilaporkan tidak ada

10) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

- a. Anggaran : Rp. 130.000.000,- ( seratus tiga puluh juta rupiah ).
- b. Maksud kegiatan :

1. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kessos Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 yang antara lain meliputi ketepatan sasaran (objek) dan lokasi kegiatan, efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya (input), serta pencapaian keluaran (output) kegiatan
2. Dengan terpantau dan terinventarisirnya permasalahan-permasalahan pembangunan pada bidang Pemerintahan dan Kesra, akan memudahkan dalam melakukan evaluasi kebijakan dan program pembangunan bidang Pemerintahan dan Kessos yang meliputi hasil (outcome) dan manfaat (benefit) kegiatan pembangunan
3. Melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan yang meliputi hasil (outcome) dan manfaat (benefit) program dan kegiatan

4. Fasilitasi rapat – rapat koordinasi teknis rumpun bidang Pemerintahan dan Kessos.
  5. Melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan / program pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kessos.
  6. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan akhir.
- c. Sasaran kegiatan
- Program dan kegiatan pada OPD rumpun bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Purbalingga dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai antara lain:
1. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kessos.
  2. Tercapainya peningkatan kapasitas kinerja pelaksanaan pembangunan pada rumpun bidang Pemerintahan dan Kessos di Kabupaten Purbalingga.
- d. Hasil Kegiatan
1. Terpantaunya pelaksanaan kegiatan pembangunan pada rumpun Bidang Pemerintahan dan Kessos Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 yang antara lain meliputi ketepatan sasaran (objek) dan lokasi kegiatan, efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya (input), serta pencapaian keluaran (output) kegiatan
  2. Terpantaunya pelaksanaan kegiatan pembangunan pada rumpun Bidang Pemerintahan dan Kessos, sehingga dapat tersedia data dan informasi yang lengkap atas pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dengan melakukan evaluasi, pengukuran akurasi dan identifikasi permasalahan dan tantangan yang dijumpai dalam implemmentasi kebijakan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial.
  3. Terfasilitasinya rapat – rapat koordinasi dan kegiatan – kegiatan pada Bidang Pemerintahan dan Kessos.
- e. Realisasi Anggaran: Rp. 111.966.324,00 (seratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) atau (86.13%), dengan sisa anggaran Rp. 18.033.676,-
- f. Permasalahan yang dihadapi :
1. Tidak semua kegiatan pembangunan pada semua OPD rumpun Bidang Pemerintahan dan Kessos dapat terpantau semuanya, karena keterbatasan personil dan waktu, sehingga monitoring dan evaluasi dilakukan pada kegiatan / program besar dan strategis, terutama program dan kegiatan yang terkait langsung dengan upaya penurunan kemiskinan, peningkatan IPM dan pengurangan pengangguran.
  2. Perlu melibatkan OPD secara lebih intens dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan pada rumpun Bidang Pemerintahan dan Kessos.
- g. Solusi yang ditempuh : Dibuat jadwal monitoring dan evaluasi yang lebih intensif tentunya dengan terlebih dahulu melakukan sinkronisasi dengan kegiatan / program lain pada BAPPELITBANGDA. Perlu optimalisasi tindak

lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi bukan hanya laporan, namun telaah teknokratis dengan lebih intensif.

- h. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan : baik dan sangat mendukung penyelesaian pekerjaan
- i. Hal- hal yang perlu dilaporkan tidak ada

#### 11) Kordinasi dan Singkronisasi Program Keciptakarya dan Penataan Ruang Daerah

- a. Kordinasi dan Singkronisasi Program Keciptakarya dan Penataan Ruang Daerah

Pembangunan Purbalingga yang begitu cepat di berbagai bidang terutama bidang keciptakarya maka perlu adanya Kordinasi dan Singkronisasi Program Keciptakarya dan Penataan Ruang Daerah. Dengan adanya kordinasi dan singkronisasi diharapkan pembangunan bisa sesuai dengan visi dan misi Bupati Purbalingga. Tujuannya adalah untuk:

1. Mensinkronkan Program Keciptakarya dan Penataan Ruang Daerah di setiap OPD;
  2. Kordinasi kegiatan penataan Ruang sesuai dengan RTRW;
  3. Terpantaunya pembangunan bidang Keciptakarya di kabupaten Purbalingga;
- b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan:  
Terlaksananya Kordinasi dan Singkronisasi Program Keciptakarya dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Purbalingga. .
  - c. Hasil kegiatan: Terpantaunya Program Keciptakarya dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga.
  - d. Sasaran: Pembangunan fisik Program Keciptakarya dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga.
  - e. Anggaran: Rp.104.935.000,00 (Seratus empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
  - f. Realisasi : Rp.95.170.567,00 (Sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah)
  - g. Sisa anggaran : Rp. 9.764.433,00 ( Sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah)
  - h. Permasalahan: Masih banyak Program Keciptakarya dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga yang terkendala dengan fungsi ruang;
  - i. Solusi: Perlu adanya Kordinasi dan Singkronisasi Program Keciptakarya dan Penataan Ruang Daerah dengan OPD yang membutuhkan.

#### 12) Penyusunan Evaluasi Makro Ekonomi Daerah

- a. Anggaran: Rp. 99.660.000 ( sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah )
- b. Maksud kegiatan

1. Menganalisis pencapaian Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Purbalingga dari sisi pengeluaran dan sisi sektoral untuk mengetahui capaian perekonomian daerah Kabupaten Purbalingga.
  2. Menganalisis pencapaian PDRB Kabupaten Purbalingga selama 5 (lima) tahun terakhir untuk mengetahui capaian pertumbuhan ekonomi daerah pertahun serta pertumbuhan proporsi setiap sektor terhadap total PDRB
  3. Menganalisis perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) setiap bulan untuk mengetahui perkembangan inflasi.
- c. Sasaran Kegiatan : Pemerintah Daerah, berbagai komponen masyarakat dan stakeholders terkait.
  - d. Hasil kegiatan : Tersusunnya Buku Analisis Situasi Makro Ekonomi Daerah (PDRB) serta Buku Indeks Harga Konsumen (IHK) Kabupaten Purbalingga Tahun 2017
  - e. Realisasi anggaran: Rp. 86.575.500,- (delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah ), atau 86,87 persen. Dengan sisa anggaran sebesar Rp. 13.084.500,-
  - f. Permasalahan yang dihadapi: Masih terbatasnya sumber data dan kemampuan SDM dalam mengelola data.
  - g. Solusi yang ditempuh; Melaksanakan kolaborasi/kerjasama dengan BPS selaku narasumber penyediaan data statistik.
  - h. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan: baik
  - i. Hal- hal yang perlu dilaporkan: tidak ada

13) Penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Manusia

- a. Anggaran : Rp. 75.000.000,- ( tujuh puluh lima juta ).
- b. Maksud kegiatan:
  - Mengkompilasi data capaian IPM dan indeks kompositnya
  - Melakukan evaluasi dan analisis atas capaian IPM dan indeks kompositnya yang meliputi analisis capaian IPM antar waktu (time series) dan analisis posisi relatif
  - Menginventarisir dan memetakan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian IPM dan indeks kompositnya
  - Merekomendasikan upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan pencapaian IPM
  - Guna mengawal target capaian IPM pada tahun 2021 sebesar > 70, perlu dilakukan evaluasi dan analisis, serta komparasi antara target capaian dan capaian target IPM dan indikator kompositnya, sehingga dapat dilakukan strategi agar dapat memenuhi target pada tahun 2021
- c. Sasaran Kegiatan : Program dan kegiatan serta data pada OPD yang menjadi bahan / data dasar penyusunan capaian indikator komposit IPM dan mempunyai pengaruh baik langsung maupun tidak langsung dan mempengaruhi komposit IPM.
- d. Hasil kegiatan : Hasil kegiatan berupa buku hasil evaluasi kinerja pembangunan manusia untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam intervensi program pembangunan, sehingga mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia.

- e. Realisasi anggaran : Rp. 74.482.114,- ( tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu seratus empat belas rupiah ) atau (99,31%), dengan sisa anggaran Rp. 517.886,-
- f. Permasalahan yang dihadapi : tidak ada
- g. Solusi yang di tempuh : -
- h. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan: baik dan sangat mendukung penyelesaian pekerjaan
- i. Hal- hal yang perlu di laporkan : tidak ada

#### 14) Purbalingga EXPO

- a. Anggaran : Rp. 1.497.000.000.- (Satu milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah)
- b. Maksud Kegiatan :
  1. Sebagai salah satu rangkaian prosesi dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Purbalingga yang ke 187 dengan memberikan hiburan tersendiri bagi masyarakat Purbalingga;
  2. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang hasil-hasil pembangunan yang selama ini telah dicapai oleh Purbalingga melalui berbagai unsur baik Pemerintah itu sendiri, Organisasi Kemasyarakatan dan pihak swasta;
  3. Menjadikan motivasi bagi seluruh lapisan masyarakat untuk terus berkarya baik dibidang IPTEK, Seni dan Budaya, Pariwisata, maupun sektor lainnya;
  4. Menyediakan ruang promosi bagi produk lokal;
  5. Mendorong berkembangnya sektor industri kreatif;
  6. Mendorong berkembangnya desain produk kreatif di Kabupaten Purbalingga;
  7. Meningkatkan pemasaran dan memperluas jaringan pemasaran; serta
  8. Meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan IKM industri kreatif di Kabupaten Purbalingga.
- c. Hasil Kegiatan: Terlaksananya kegiatan Purbalingga Expo yang dilaksanakan pada Tanggal 14 s.d 17 Desember 2017 bertempat di halaman parkir stadion Goentoer Darjono Purbalingga beserta Dokumentasi pelaksanaannya.
- d. Sasaran Kegiatan : Sukses dan meriahnya pelaksanaan Purbalingga Expo dengan diikuti oleh seratus empat (104) stand peserta yang meliputi tiga (3) unsur yaitu Menampilkan Hasil-hasil Pembangunan yang telah diraih, Potensi Produk Unggulan Daerah, dan IPTEK dan Budaya serta mewakili dari unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 29 stand peserta, 18 Kecamatan, 7 stand Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), 9 stand Unit Kerja Vertikal, 7 stand Forkopimda, 8 stand Organisasi Kemasyarakatan, 8 stand unsur Pendidikan, 4 stand unsur Kepariwisataaan, 7 stand UMKM, dan 6 stand unsur Komunitas.
- e. Realisasi Anggaran : Rp. 1.252.660.865,- (Satu milyar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) atau sebesar 83,68% (Delapan puluh tiga koma enam puluh delapan persen).
- f. Permasalahan yang dihadapi : Diantaranya adalah dikarenakan kegiatan Purbalingga Expo ini dilaksanakan dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Purbalingga yang di peringati setiap tanggal 18 Desember dan dengan dana

bersumber dari anggaran perubahan serta mekanisme pengadaan sarprasnya melalui proses lelang, sehingga waktu persiapan pelaksanaan yang dibutuhkan sangat pendek dan juga proses administrasi yang harus dilakukan setelah pelaksanaan event juga sangat menyita waktu di akhir tahun pelaksanaan anggaran APBD.

- g. Solusi yang ditempuh : Menyusun jadwal terinci dan padat serta membagi tugas ke beberapa tim koordinator yang melibatkan antar lintas OPD serta ke semua stakeholder lainnya dan juga dengan melibatkan semua pelaku usaha yang telah biasa melaksanakan event sejenis.
- h. Kondisi sarana dan prasarana : Sangat baik dan mendukung terlaksananya kegiatan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan
- i. Hal-hal yang perlu dilaporkan : Tidak ada

#### 15) Pilot Project Pengelolaan Sumberdaya Air Terpadu

- a. Anggaran : Rp. 45.000.000.- (empat puluh juta rupiah).
- b. Maksud Kegiatan :
  - 1. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola sumber daya air secara lebih optimal dan berkelanjutan untuk menjamin tercukupinya kebutuhan air minum, air bersih dan air irigasi pertanian dan usaha budidaya lainnya bagi sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta kebutuhan dasar manusia yang berkaitan dengan sumber daya air secara selaras dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan secara proporsional.
  - 2. bahwa dibutuhkan satu bentuk perencanaan bangunan air yang berfungsi secara terpadu mewadahi seluruh kepentingan pemakai air pada satu sumber mata air lokus kegiatan, yaitu di Mata Air Situ Tirta Marta (Tlaga) di Desa Karangcegak, Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga.
- c. Hasil Kegiatan :
  - 1. Tersusunnya Buku Laporan Pendahuluan sebanyak 5 (lima) buku.
  - 2. Tersusunnya Buku Laporan Akhir sebanyak 5 (lima) buku didalamnya berisi gambar rencana bangunan air terpadu.
- d. Sasaran Kegiatan : Tersusunnya dokumen perencanaan bangunan air terpadu yang mampu mengakomodir seluruh kepentingan stakeholders SDA di Mata Air Situ Tirta Marta (Tlaga) di Desa Karangcegak, Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga.
- e. Realisasi Anggaran : Rp 43.980.000,- (empat puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau sebesar 97,73% (Sembilan puluh tujuh koma tujuh persen).  
Dengan sisa anggaran Rp. 1.020.000,- ( Satu juta dua puluh ribu rupiah)
- f. Permasalahan yang dihadapi : Perencanaan bangunan air secara terpadu merupakan inovasi di dalam mengelola, mengembangkan dan melestarikan SDA yang melibatkan peran aktif seluruh stakeholdesnya, sehingga faktor egosektoral menjadi satu kendala. Keterbatasan waktu karena kesibukan dan ketidak samaan waktu luang yang tersedia masing-masing stakeholders untuk

berkumpul/rapat juga menjadi permasalahan berkomunikasi secara langsung. Yang ketiga adalah pola perencanaan yang bersifat partisipatif merupakan hal baru.

- g. Solusi yang ditempuh : Melaksanakan koordinasi dan komunikasi secara efektif pada seluruh stakeholders baik di waktu kerja maupun diluar jam kerja. Penyamaan persepsi/ mindset antar stakeholders.
- h. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan : Cukup baik dan mendukung terlaksananya kegiatan.
- i. Hal-hal yang perlu dilaporkan : Tidak ada

#### c. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah

Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah terdiri dari 7 kegiatan meliputi:

- 1) Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran
  - a. Maksud pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
  - b. Hasil Kegiatan adalah terpenuhinya honor-honor kegiatan, uang lembur, alat tulis kantor, alat-alat listrik, perangkano dan meterai, peralatan kebersihan, gas, umbul-umbul, telepon, listrik, air, surat kabar, internet, barang cetak, fotocopy dan makan minum.
  - c. Sasarannya sebagai penunjang dalam pemenuhan prasarana yang dibutuhkan dalam memperlancar kegiatan rutin Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga
  - d. Anggaran kegiatan penyediaan bahan dan jasa perkantoran ini sebesar Rp.391.103.000,- realisasinya sebesar Rp.356.351.465,- atau 91,11%.
  - e. Permasalahan yang dihadapi tidak ada.
  - f. Upaya Pemecahan Masalah: tidak ada.
- 2) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
  - a. Maksud pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan rapat-rapat dan konsultasi baik yang ada di dalam daerah maupun yang ada di luar daerah
  - b. Hasil kegiatan yaitu terpenuhinya rapat - rapat dan konsultasi yang ada di dalam daerah serta rapat - rapat dan konsultasi yang ada di luar daerah, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan baik.
  - c. Sasarannya yaitu semua aparatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga, baik yang mengadakan perjalanan di dalam daerah maupun yang melaksanakan perjalanan ke luar daerah
  - d. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 289.860.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 286.321.018,- atau 98,78%.
  - e. Permasalahan yang dihadapi : banyaknya undangan tidak sebanding dengan anggaran yang tersedia
  - f. Solusi yang ditempuh kedepan adalah dengan melakukan efisiensi anggaran.
- 3) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

- a. Maksud pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terpeliharanya sarana dan prasarana kantor selama 1 (satu) tahun berjalan.
  - b. Hasil kegiatan yaitu terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor sehingga dapat digunakan secara optimal dalam mendukung kelancaran tugas sehari-hari.
  - c. Sasarannya adalah terpeliharanya sarana prasarana kantor yang perlu diperbaiki/dipelihara sehingga manfaatnya dapat lebih dioptimalkan.
  - d. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.305.627.000,- dan realisasinya sebesar Rp.303.475.950,- atau 99,30%.
  - e. Permasalahan yang dihadapi yaitu banyaknya kendaraan baik roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua) yang sudah lama masa pakainya dan masih tingginya biaya pemeliharaan hardware dan software komputer karena terbatasnya tenaga teknis informasi ( IT )
  - f. Solusi yang ditempuh adalah perlu peremajaan kendaraan baik roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua) dan penempatan tenaga teknis informasi (IT) yang memadai untuk menekan belanja pemeliharaan sarana dan prasarana
- 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
- a. Maksud pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor dalam mendukung perencanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.
  - b. Hasil Kegiatan adalah Hasil kegiatan terlaksananya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor sesuai dengan kebutuhan maupun spesifikasinya, adapun aset pengadaan tahun 2017 pada Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :
- |                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| 1. Sepeda Motor                                 | 2 unit |
| 2. Papan Nama Instansi                          | 2 unit |
| 3. Finger Print                                 | 1 unit |
| 4. Meja Rapat                                   | 1 unit |
| 5. Kursi Rapat                                  | 5 unit |
| 6. Meja Coffee Corner                           | 2 unit |
| 7. Kursi Coffee Corner                          | 3 unit |
| 8. Interior Front Office Minimalis              | 1 unit |
| 9. AC Split                                     | 6 unit |
| 10. Sound System ruang meeting:                 |        |
| ✓ - TOA ZA 2120 Power Amplifier 120 w           | 1 unit |
| ✓ - Speaker TOA ZS 1030 B 30 w                  | 2 unit |
| 11. Sound System ruang aula                     |        |
| ✓ mic wireless shure u888, (4 pcs mic handheld) | 1 unit |
| 12. Wireless Amplifier                          | 1 unit |
| 13. Televisi                                    | 1 unit |
| 14. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)              | 2 unit |
| 15. Laptop                                      | 1 unit |
| 16. Printer                                     | 6 unit |
| 17. Drone Camera                                | 1 unit |
| 18. MMP                                         | 3 unit |
| 19. Layar gulung                                | 1 unit |

- c. Sasaran dari kegiatan ini adalah sarana dan prasarana kantor dalam mendukung kegiatan perencanaan pembangunan daerah
  - d. Anggaran pengadaan sarana dan prasarana kantor tahun 2017 sebesar Rp.213.100.000,- dan realisasinya sebesar Rp 206.738.000,- atau 97,01%.
  - e. Permasalahan yang dihadapi, tidak ada.
- 5) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
- a. Maksud dari pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur pemerintah.
  - b. Hasil kegiatan adalah
    - i Pengiriman seleksi tugas belajar 2 orang
    - ii Pengiriman workshop
    - iii Pengiriman lokakarya
  - c. Sasarannya aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditunjuk/ditugasi untuk melaksanakan diklat dimaksud.
  - d. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp 20.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp.14,382,421.00 atau 71,91%
  - e. Permasalahan yang dihadapi adalah bahwa sifat dari kegiatan adalah mengirimkan peserta, sehingga taksiran biaya dan waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan.
  - f. Solusi yang ditempuh adalah kedepan dalam menyusun perencanaan mengacu pelatihan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan untuk lintas sektoral khususnya dinas tingkat Provinsi diharapkan lebih awal memberitahukan jenis kegiatan seperti seminar, diklat dan sosialisasi serta kegiatan lain yang akan dilaksanakan dengan perincian waktu, tempat dan biaya / kontribusi yang harus disediakan.
- 6) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD
- a. Maksud dari kegiatan ini adalah menyediakan dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi pelaksanaan kinerja program dan kegiatan.
  - b. Hasil Kegiatan adalah 1 dokumen renja SKPD, 1 dokumen renstra, 1 Dokumen LKPJ, 1 dokumen LKJ Ip.
  - c. Sasaran dari kegiatan ini adalah agar program dan kegiatan Bappeda dilaksanakan dengan efektif dan efisien sesuai tujuan organisasi.
  - d. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 40.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 30,044,400.00 atau 75,11%
  - e. Permasalahan yang Dihadapi : penyusunan LKPJ dan LKJ Ip tergantung pada penyelesaian dari seluruh OPD terutama untuk menghitung rata-rata kinerja sehingga penyusunan LKPJ dan LKJ IP sering terlambat,
  - f. Upaya Pemecahan Masalah : koordinasi secara terus menerus dengan seluruh SKPD.
  - g. Upaya Pemecahan Masalah, tidak ada.

## 7) Penataan Arsip

- a. Maksud dari pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur pemerintah.
- b. Hasil kegiatan adalah tersusunnya arsip yang baik.
- c. Sasarannya aparatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang ditunjuk/ditugasi untuk melaksanakan diklat dimaksud.
- d. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp 20.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp19.971.400,- atau 99,86%.
- e. Permasalahan yang dihadapi adalah bahwa sifat dari kegiatan adalah mengirimkan peserta, sehingga taksiran biaya dan waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan.
- f. Solusi yang ditempuh adalah kedepan dalam menyusun perencanaan mengacu pelatihan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan untuk lintas sektoral khususnya dinas tingkat Provinsi diharapkan lebih awal memberitahukan jenis kegiatan seperti seminar, diklat dan sosialisasi serta kegiatan lain yang akan dilaksanakan dengan perincian waktu, tempat dan biaya / kontribusi yang harus disediakan.

## 2. Tujuan 2 : Penguatan kelembagaan inovasi daerah

Dalam mencapai tujuan tersebut pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Purbalingga menempatkan 1 (satu) inovatornya yang menduduki pemenang harapan 1 penghargaan krenova tingkat provinsi. Dalam Penguatan kelembagaan inovasi daerah, sasaran yang telah dicapai pada tahun 2017 adalah meningkatnya kapasitas penelitian dan pengembangan iptek daerah. Peningkatan kapasitas litbang ditandai dengan rekomendasi hasil kelitbangan dan jaringan kemitraan pemerintah daerah dengan lembaga iptek.

### 2.1. Rekomendasi Hasil Kelitbangan

Indikator rekomendasi hasil kelitbangan merupakan keluaran dari seragnkaian hasil penelitian yang dilakukan peneliti dan tim peneliti. Realisasi dari indikator ini adalah 3 rekomendasi dari 4 rekomendasi yang ditargetkan. Adapun rekomendasi yang dikeluarkan pada seragnkaian kegiatan ini meliputi rekomendasi pengembangan desa inovasi, rekomendasi konsep penanggulangan kemiskinan desa dan rekomendasi sosial ekonomi keluarga Pekerja Wanita

### 2.2. Jaringan kemtraan pemerintah daerah dengan lembaga iptek

Indikator Jaringan kemtraan pemerintah daerah dengan lembaga iptek diukur dari seberapa jumlah kerjasama yang dijalin dalam penelitian dan pengembangan inovasi daerah. Realisasi jaringan kemitraan pemerintah daerah dengan lembag iptek sebanyak 11 mitra dari target sebanyak 6 mitra. Adapun mitra tersebut adalah Unsoed, UMP, IAIN Purwokerto, STIKES CH Purwokerto, Poltekkes Jakarta, UGM, Unmuh Pacitan, Unwiku, UPP IPTEKIN Provinsi Jawa Tengah, BPPT dan LIPI.

Secara lengkap ikhtisar capaian kinerja sasaran pada tahun 2016 dan 2017 tergambar pada tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.2

Realisasi Sasaran Kinerja Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan  
Bappelitbangda  
Tahun 2017

SASARAN/ INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2016			TAHUN 2017		
	TARGE T	REALIS ASI	PERSEN TASE	TARGET	REALISASI	PERS ENTA SE
Meningkatnya kapasitas penelitian dan pengembangan iptek daerah						
♦ Jumlah rekomendasi hasil kelitbangan	2 dok	2 dok (SIDA dan Kajian Perceraian )	100 persen	4 dokumen	3 dokumen (pengembangan desa inovasi, konsep penanggulagn kemiskinan desa & Pekerja Wanita	75 persen
♦ Jumlah jaringan kemitraan pemerintah daerah dengan lembaga iptek	6 mitra	6 mitra (Unsoed, UMP, Poltekkes Jakarta, UGM, Ibaraki University, Balitbangp rov Jateng)	100 persen	6 mitra	11 mitra (Unsoed, UMP, IAIN Purwokerto, STIKES CH Purwokerto, Poltekkes Jakarta, UGM, Unmuh Pacitan, Unwiku, UPP Iptekin Jateng, BPPT, LIPI)	100 persen

Fungsi penelitian dan pengembangan melaksanakan 1 program yakni Program Penelitian dan Pengkajian Daerah dengan 6 (enam) kegiatan meliputi:

1) Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Daerah

- a Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu terlaksananya fasilitasi iin penelitian, desiminasi hasil litbang, keikutsertaan lomba krenova tk Provinsi Jawa Tengah, pelaksanaan lomba Krenova Tk. Kabupaten Purbalingga dan Pameran Krenova Tk. Provinsi Jawa Tengah.
- b Hasil kegiatan : terfasilitasinya ijin penelitian sebanyak 532 surat. Diseminasi hasil penelitian/kajian sebanyak 4 topik, pameran krenova 1 kali kegiatan, mengikuti lomba krenova tingkat provinsi 5 topik kreasi inovasi, lomba krenova tingkat Kabupaten 1 kali kegiatan diikuti 18 karya dari masyarakat dan sekolah, mengikuti apmeran krenova tk Provinsi Jawa Tengah 1 kali di Pekalongan.
- c Sasaran, Kelompok sasaran Keg. : Instansi Pemerintahan, Swasta dan Masyarakat

- d Anggaran : Rp.150.000.000,- ; Realisasi : Rp.149.975.000,- (99,98%) ; sisa anggaran : Rp. 25.000
- e Perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan ini sudah melalui dan termuat dalam RKPD Tahun 2017, Renja BAPPELITBANGDA Tahun 2017 dan RKA BAPPELITBANGDA Tahun 2017.
- f Permasalahan yang dihadapi : masih terbatasnya SDM di kelitbang, kurangnya motivasi untuk melakukan riset/penelitian dan pengembangan dan masih rendahnya penerapan hasil ristek karena kurangnya informasi kemasyarakat tentang hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang ada.
- g Solusi : Memotivasi para inventor melalui kegiatan lomba krenova, melakukan diseminasi hasil litbang dan mengikutsertakan para inventor/peneliti dalam ajang pameran sebagai upaya untuk pengembangan dan peningkatan penerapan hasil ristek ;
- h Kondisi sarana prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dalam kondisi baik.
- i Hal yang perlu dilaporkan : perlu dukungan lebih untuk dapat mengangkat atau memperkenalkan hasil-hasil penelitian ke masyarakat pengguna sebagai upaya peningkatan kesejahteraan.

## 2) Peningkatan SDM Litbang dalam Metodologi Penelitian

- a Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas SDM Kelitbang untuk para pendidik karya ilmiah remaja tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Purbalingga.
- b Hasil kegiatan : pelatihan peningkatan kapasitas SDM Kelitbang/bina ilmiah untuk para pendidik karya ilmiah remaja tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Purbalingga sebanyak 75 orang guru. Narasumber dari LIPI.
- c Sasaran, Kelompok sasaran Keg. : Pendidik bina ilmiah/karya ilmiah remaja tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Purbalingga.
- d Anggaran : Rp. 25.000.000,- ; Realisasi : Rp.24.936.148,- (99,74%) sisa anggaran : Rp. 63.852,-
- e Perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan ini sudah melalui dan termuat dalam RKPD Tahun 2017, Renja BAPPELITBANGDA Tahun 2017 dan RKA BAPPELITBANGDA Tahun 2017.
- f Permasalahan yang dihadapi : masih terbatas dan rendahnya kualitas SDM di kelitbang, serta kurang termotivasi untuk melakukan riset/penelitian dan pengembangan.

- g Solusi : melatih para pendidik/guru SMP dan SMA sederajat melalui kegiatan bina ilmiah khususnya dalam penulisan karya ilmiah untuk bekal dalam mendidik siswa dalam penulisan karya ilmiah.
- h Kondisi sarana prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dalam kondisi baik.
- i Hal yang perlu dilaporkan : kegiatan ini perlu dilanjutkan, karena anggaran yang terbatas sehingga belum semua pendidik baik guru SMP dan SMA sederajat mengikutinya.

### 3) Survey Potensi Klaster Ekonomi Kerakyatan

#### a Maksud dan Tujuan :

1. Melakukan pendataan keberadaan dan potensi ekonomi klaster usaha mikro dan kecil di Kabupaten Purbalingga.
2. Mengidentifikasi pola dan strategi pengembangan potensi ekonomi klaster usaha mikro dan kecil di Kabupaten Purbalingga.

#### b Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Terlaksananya kegiatan penyusunan buku Survey Potensi Klaster Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Purbalingga.

#### c Hasil Kegiatan

1. Tersedianya data-data terkait potensi klaster ekonomi kerakyatan di Kabupaten Purbalingga
2. Strategi penataan dan pengembangan potensi ekonomi klaster usaha mikro dan kecil di Kabupaten Purbalingga.
3. Tersusunnya buku 20 buku Potensi Klaster Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Purbalingga.

#### d Sasaran :

Sasaran dari kegiatan pendataan potensi klaster ini adalah klaster-klaster yang menjadi binaan dari :

1. Forum of Economic Development and Employment Promotion (FEDEP) Kabupaten Purbalingga dan
2. UMK-UMK binaan OPD terkait di Kabupaten Purbalingga, Lokasi pendataan potensi klaster ekonomi kerakyatan berlokasi di wilayah administrasi Kabupaten Purbalingga.

e Target dan Realisasi Keuangan

Anggaran sebesar Rp 65.050.000,- sampai dengan Desember 2017 realisasi kegiatan sebesar 100%, dan realisasi anggaran sebesar Rp. 61.342.000,- (94,3%). Sisa anggaran Rp. 3.708.000,-

f Permasalahan yang Dihadapi :

1. Kurang terbinanya kelembagaan klaster ekonomi kerakyatan secara intensif dan terus menerus di Purbalingga, sehingga sebagian besar klaster tidak ada aktifitas pertemuan kelompok atau tidak aktif (mati suri);
2. Rendahnya efisiensi produk dan inovasi teknologi serta desain produk, menyebabkan kurangnya daya saing produk di pasar tingkat konsumen.

g Upaya Pemecahan Masalah

1. Perlunya identifikasi potensi ekonomi dan kelembagaan klaster agar dapat dipetakan permasalahan spesifik dan solusinya;
2. Perlu inventarisasi klaster-klaster ekonomi kerakyatan andalan dan unggulan daerah agar dapat didorong untuk menjadi penghela kemajuan ekonomi lokal.

h Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tahun 2017 dalam keadaan baik.

i Hal-hal lain yang perlu dilaporkan

Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada.

4) Penyusunan Evaluasi Ekonomi dan Kesra

- a Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu tersusunnya 20 buku evaluasi ekonomi dan kesra dalam bentuk buku sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun Anggaran Pemerintah Daerah.
- b . Hasil kegiatan : Rp. 68.260.000,- ; Realisasi : 62.897.500,- (92.14%) sisa anggaran : Rp. 5.362.500,-
- c . Permasalahan yang dihadapi : Anggaran yang masih terbatas, keterbatasan SDM dalam pengolahan dan penginput data dilapangan.
- d . Solusi : penyediaan anggaran yang cukup dan memadai, ketersediaan SDM bagi pengolah dan menginput data dilapangan.

5) Analisis Perekonomian Daerah hasil Sensus Ekonomi 2016

- a. Maksud kegiatan : Melakukan analisis terhadap dokumen Sensus Ekonomi 2016 sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

- b. Sasaran kegiatan : Pemerintah Daerah, berbagai komponen masyarakat dan stakeholders terkait.
- c. Hasil kegiatan: Tersedianya hasil analisis Sensus Ekonomi 2016. 30 buku potret ekonomi daerah
- d. Anggaran : Rp. 68.955.000,- (enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)
- e. Realisasi Anggaran : Rp. 62.791.000,- (Enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) atau 91,06persen. Sisa anggaran Rp. 6.164.000,-
- f. Permasalahan yang dihadapi : Masih terbatasnya sumber data dan kemampuan SDM dalam mengelola dan menganalisis data
- g. Solusi yang di tempuh : Melaksanakan kolaborasi/kerjasama dengan BPS selaku narasumber penyediaan data statistik.
- h. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan : Baik dan sangat mendukung penyelesaian pekerjaan
- i. Hal- hal yang perlu dilaporkan : tidak ada

6) Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

- a. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu terlaksananya pemerkuatan SIDa yang sesuai dengan Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang SIDa.
- b. Hasil kegiatan : Penyusunan Pergub SIDa, Sosialisasi Roadmap Sistem Inovasi Daerah dan Workshop Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Purbalingga.
- c. Sasaran, Kelompok sasaran Keg. : Masyarakat, Ormas, Akademisi, Swasta dan Stakeholder di pemerintahan.
- d. Anggaran : Rp. 74.820.000,- ; Realisasi : Rp.63.155.942,- (84,41%) sisa anggaran: Rp. 11.664.058,-

B. Realisasi Anggaran

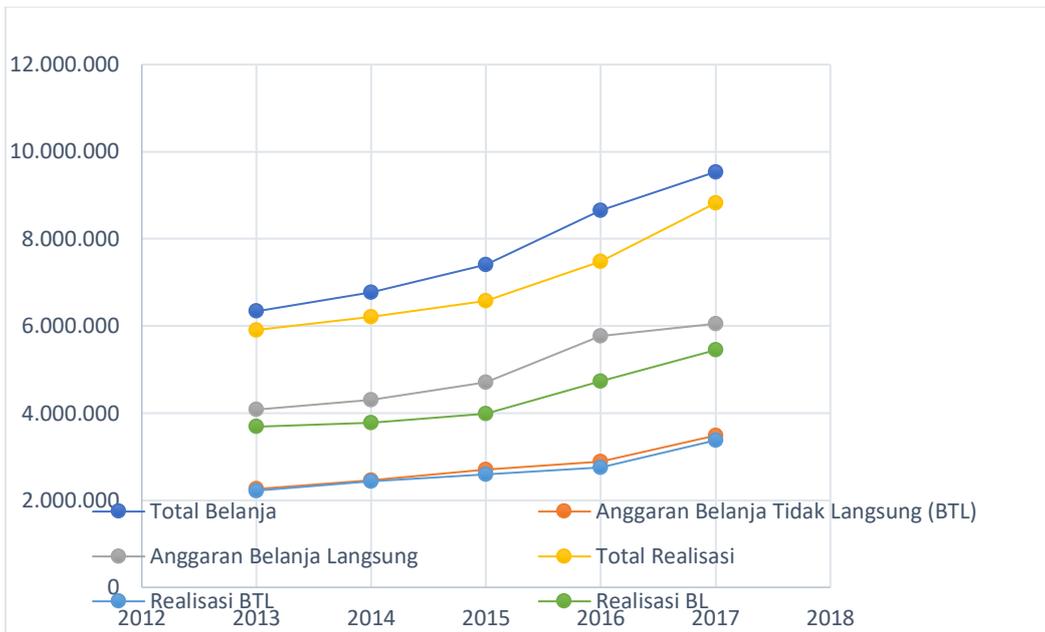
Pada tahun 2017 Bappelitbangda mendapatkan Anggaran sebesar Rp. 9.536.671.000,- yang naik sebesar 16,82 % dari tahun 2016 sebesar Rp. 8.653.649.000,-. Anggaran sejumlah Rp. 9.536.671.000,- dialokasikan untuk belanja tidak langsung sebanyak Rp 3,485,055.000 (36,54 %) dan belanja langsung sebanyak Rp. 6,051,616.000 (66,61%). Realisasi belanja pada tahun 2017 sebesar Rp. 8.,819.,390.100 atau 92,48 % yang terdiri dari belanja tidak langsung adalah sebanyak Rp. 3.374.253.731,- (96,82 %) dari anggaran yang tersedia sebanyak Rp 3,485,055.000,-, sedangkan belanja langsung dari anggaran yang ada sebanyak Rp. 6.051.616.000,- direlaisasikan sebesar Rp. 5.445.136.369,- ( 89,98 %).

Secara umum perbandingan belanja dan realisasi selama lima tahun seperti tergambar pada tabel 1 dibawah ini, terlihat bahwa dari tahun ketahun persentase realisasi keuangan semakin menurun hal ini terlihat pada grafik dibawah ini. Persentase realiasi belanja tidak langsung lebih menunjukkan konsistensi bila dibandingkan dengan belanja langsungnya.

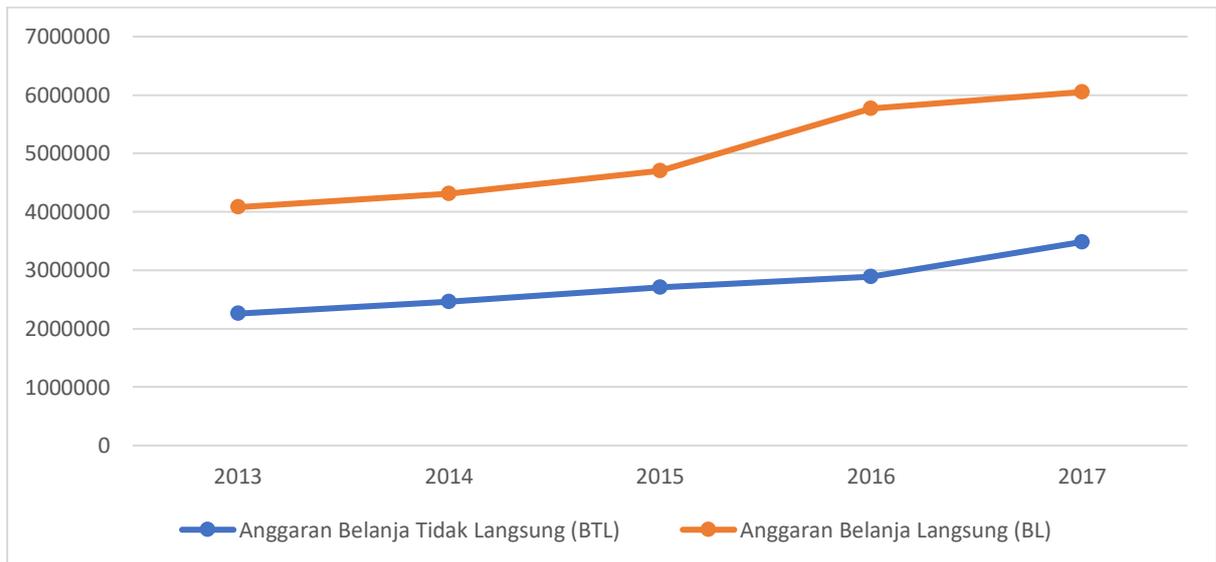
Tabel 6  
Perbandingan Total Realisasi Belanja Tidak Langsung Dan Belanja Tidak Langsung  
Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Total Belanja	6,337,776	6,770,153	7,407,704	8,653,649	9,536,671
2	Anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL)	2,257,785	2,462,147	2,706,555	2,889,263	3,485,055
3	Anggaran Belanja Langsung (BL)	4,079,991	4,308,006	4,701,149	5,764,386	6,051,616
4	Total Realisasi	5,907,966	6,211,427	6,574,489	7,479,198	8,819,390
5	Realisasi BTL	2,220,439	2,429,976	2,589,219	2,747,144	3,374,253
6	Realisasi BL	3,687,527	3,781,452	3,985,270	4,732,054	5,445,136
7	Proporsi BTL Terhadap Total Belanja	35.62%	36.37%	36.54%	33.39%	36.54%
8	Proporsi BL Terhadap Total Belanja	64.38%	63.63%	63.46%	66.61%	63.46%
9	Persentase Realisasi Belanja	93.22%	91.75%	88.75%	86.43%	92.48%
10	Persentase Realisasi belanja Tidak Langsung	98.35%	98.69%	95.66%	95.08%	96.82%
11	Persentase Realisasi Belanja Langsung	90.38%	87.78%	84.77%	82.09%	89.98%

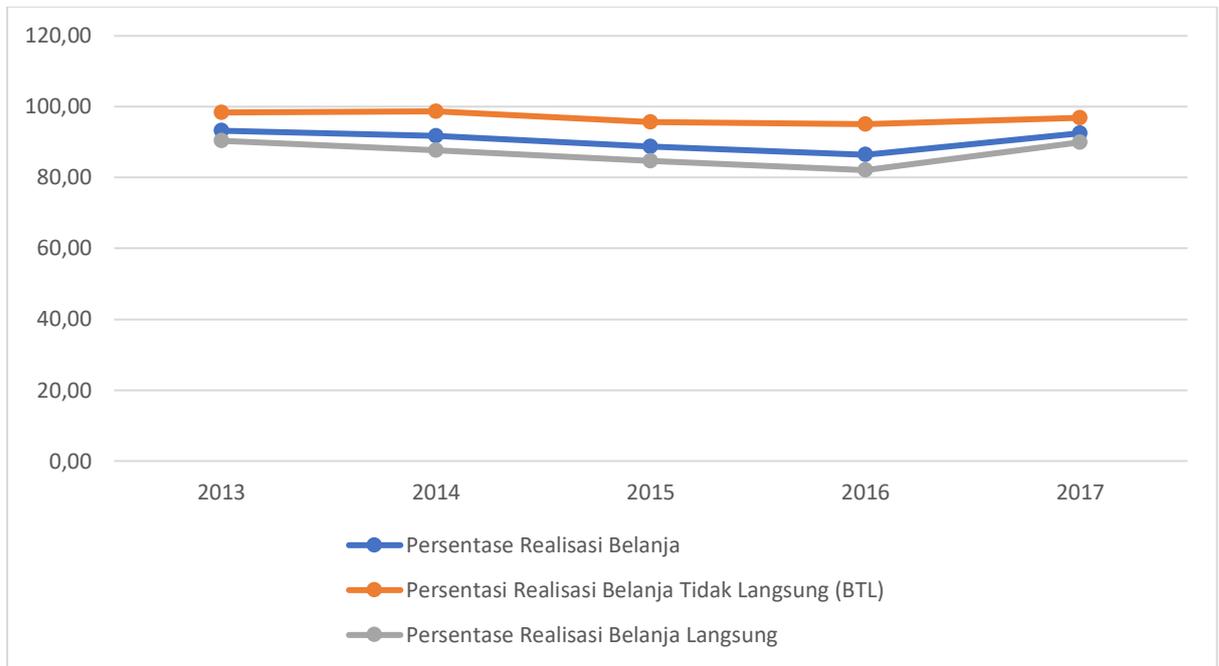
Grafik 1  
Perbandingan Anggaran Belanja Dan Realisasi Belanja  
Bappelitbangda Kab. Purbalingga Tahun 2011-2017



Grafik 2  
 Proporsi Belanja Pada Bappeda Kab. Purbalingga  
 Tahun 2013-2017



Grafik 3  
 Perbandingan Realisasi Belanja  
 Bappeda Kab. Purbalingga Tahun 2011-2016



Selanjutnya Anggaran dan realisasi anggaran setiap kegiatan Tahun 2017 sebagaimana terlihat tabel dibawah ini,

Tabel 7

**REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN 2017**

**BAPPEDA KABUPATEN PURBALINGGA**

No	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran	Persentase
I	<b>BELANJA</b>	<b>9.536.671.000</b>	<b>8.819.390.100</b>	<b>717.280.900</b>	<b>92,48</b>
1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>3.485.055.000</b>	<b>3.374.253.731</b>	<b>110.801.269</b>	<b>96,82</b>
	Gaji dan Tunjangan Pegawai	<b>3.485.055.000</b>	3.374.253.731	110.801.269	96,82
2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>6.051.616.000</b>	<b>5.445.136.369</b>	<b>606.479.631</b>	<b>89,98</b>
A	<b>Program Penguatan Kelembagaan Perangkat daerah</b>	<b>1.279.690.000</b>	<b>1.217.284.654</b>	<b>62.405.346</b>	<b>95,12</b>
1	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	391.103.000	356.351.465	34.751.535	91,11
2	Rapat- rapat koordinasi dan Konsultasi	289.860.000	286.321.018	3.538.982	98,78
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	305.627.000	303.475.950	2.151.050	99,30
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	213.100.000	206.738.000	6.362.000	97,01
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	20.000.000	14.382.421	5.617.579	71,91
6	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	40.000.000	30.044.400	9.955.600	75,11

No	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran	Persentase
	7 Penataan Arsip	20.000.000	19.971.400	28.600	99,86
<b>B</b>	<b>Program Penelitian dan Pengkajian Daerah</b>	<b>452.085.000</b>	<b>425.102.590</b>	<b>26.982.410</b>	<b>94,03</b>
	1 Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Daerah	150.000.000	149.980.000	20.000	99,99
	2 Peningkatan SDM Litbang dalam Metodologi Penelitian	25.000.000	24.936.148	63.852	99,74
	3 Survey Potensi Klaster Ekonomi Kerakyatan	65.050.000	61.342.000	3.708.000	94,30
	4 Penyusunan Evaluasi Ekonomi dan Kesra	68.260.000	62.897.500	5.362.500	92,14
	5 Analisis Perekonomian Daerah Hasil Sensus Ekonomi 2016	68.955.000	62.791.000	6.164.000	91,06
	6 Penguatan Sistem Inovasi Daerah	74.820.000	63.155.942	11.664.058	84,41
<b>C</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>1.101.359.000</b>	<b>973.973.105</b>	<b>127.385.895</b>	<b>88,43</b>
	1 Penyelenggaraan Musrenbang	70.000.000	59.259.994	10.740.006	84,66
	2 Penyusunan RKPD Tahun 2018	199.700.000	199.181.316	518.684	99,74
	3 Penyusunan KUA PPAS Tahun 2018	124.720.000	121.836.601	2.883.399	97,69
	4 Fasilitasi SIMRENDA	112.044.000	62.498.691	49.545.309	55,78
	5 Penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2017	119.500.000	107.654.214	11.845.786	90,09

No	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran	Persentase
6	Penyusunan KUA PPAS Perubahan Tahun 2017	128.600.000	126.320.749	2.279.251	98,23
7	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	50.000.000	35.875.792	14.124.208	71,75
8	Review Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)	74.820.000	68.045.818	6.774.182	90,95
9	Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Bidang Ekonomi	49.805.000	48.396.930	1.408.070	97,17
10	Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Bidang Energi Sumber Daya Mineral Lingkungan Hidup dan Prasarana Wilayah	39.530.000	29.104.500	10.425.500	73,63
11	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Perencana	132.640.000	115.798.500	16.841.500	87,30
<b>D</b>	<b>Program Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>3.218.482.000</b>	<b>2.828.776.020</b>	<b>389.705.980</b>	<b>87,89</b>
1	Pelaporan dan Rekonsiliasi Kegiatan TP, DAK, dan Bangub	79.725.000	76.821.875	2.903.125	96,36
2	Evaluasi RKPD	82.055.000	74.663.500	7.391.500	90,99
3	WISMP	300.000.000	249.567.701	50.432.299	83,19
4	Pendamping Program WISMP	83.852.000	77.781.328	6.070.672	92,76
5	NANGKIS (Ban- Gub)	180.000.000	170.477.575	9.522.425	94,71
6	Fasilitasi FEDEP	139.715.000	132.160.685	7.554.315	94,59

No	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran	Persentase
7	Fasilitasi Green Economy and Locally Appropriate Mitigation Action Program In Indonesia (GELAMA I)	101.750.000	90.813.711	10.936.289	89,25
8	PUS (Bangub)	74.790.000	70.321.000	4.469.000	94,02
9	Fasilitasi Kuliah Kerja Nyata	225.000.000	221.333.275	3.666.725	98,37
10	Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	130.000.000	111.966.324	18.033.676	86,13
11	Koordinasi dan Sinkronasi Program Keciptakarya dan Penataan Ruang Daerah	104.935.000	95.170.567	9.764.433	90,69
12	Penyusunan Evaluasi Makro Ekonomi Daerah	99.660.000	86.575.500	13.084.500	86,87
13	Penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Manusia	75.000.000	74.482.114	517.886	99,31
14	Purbalingga EXPO	1.497.000.000	1.252.660.865	244.339.135	83,68
15	Pilot Project Pengelolaan Sumberdaya Air Terpadu	45.000.000	43.980.000	1.020.000	97,73

## BAB IV

### PENUTUP

Peran dan posisi BAPPELITBANGDA yang sangat penting dan strategis sebagai lembaga perencanaan di tahun – tahun mendatang diharapkan menunjukkan performa yang semakin baik dalam kegiatan perencanaan. Demikian pula kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dan juga instansi perangkat daerah lainnya sebagai lembaga yang mampu melakukan tugas koordinasi dalam kegiatan perencanaan dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan rencana harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan serta menjadi komitmen instansi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran Tahun 2017 berdasarkan Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya. LKjIP disusun berdasarkan laporan kinerja unit-unit kerja (eselon III dan IV) yang ada di lingkungan BAPPELITBANGDA, sehingga laporan ini merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi (*integrated and consolidated report*) terhadap pencapaian kinerja BAPPELITBANGDA secara keseluruhan.

Laporan dimaksud dapat pula dijadikan sebagai alat evaluasi untuk peningkatan kinerja BAPPELITBANGDA dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya antara lain melalui :

1. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap serta antisipatif sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.
2. Perlunya upaya-upaya sosialisasi serta workshop terhadap siklus perencanaan, hasil-hasil perencanaan, penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan oleh BAPPELITBANGDA sehingga produk BAPPELITBANGDA akan dipahami dan dapat dimanfaatkan oleh stakeholders lainnya
3. Peningkatan kompetensi SDM khususnya terkait dengan substansi permasalahan yang dihadapi bidang-bidang di BAPPELITBANGDA.
4. Perlunya upaya-upaya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang mantap melalui e-Planning sehingga kegiatan kegiatan perencanaan pembangunan semakin sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*.
5. Menjadi referensi bahan perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan Renstra BAPPELITBANGDA Tahun 2015 - 2016.

Purbalingga, 8 Februari 2018  
**Plt. KEPALA BAPPELITBANGDA**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**  
**Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan**  
**Kemasyarakatan**

**KUSMARTADHL, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650315 199103 1 013

